

BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025–2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5514);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310];

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025- 2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik suatu populasi.
9. Diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD) adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan informan yang memiliki karakteristik yang setara.

10. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok Perempuan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
13. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
14. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
15. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
16. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
19. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
20. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
21. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
22. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.

23. *Roadmap* adalah bentuk operasionalisasi Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, *roadmap* bersifat *living document* dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan dan merupakan acuan dasar dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan kependudukan agar efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk agar tumbuh secara seimbang dengan daya dukung alam dan lingkungan;
- b. mewujudkan kualitas penduduk secara optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan Daerah;
- c. mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga terwujud katahlanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata, serasi, selaras dan seimbang; dan
- e. mewujudkan administrasi dan database kependudukan secara tertib, akurat dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan publik.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) GDPK Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - c. BAB III PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL PENDUDUKAN
 - d. BAB IV VISI, MISI, DAN ISU STRATEGI KEPENDUDUKAN DAERAH
 - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - f. BAB VI ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - g. BAB VII PENUTUP
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika GDPK Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **9 Desember 2024**


BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **9 Desember 2024**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **63** .

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025-2045

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	4
C. Pengertian, Kedudukan, Ruang Lingkup, dan Pendekatan Pembangunan GDPK	
1. Batas Pengertian.....	5
2. Kedudukan GDPK	9
3. Ruang Lingkup GDPK.....	10
4. Pendekatan Penyusunan GDPK	10
BAB II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	12
A. Analisis Situasi Kependudukan.....	12
1. Kuantitas Penduduk	12
a. Pertumbuhan Penduduk dan Fertilitas	12
b. Mortalitas Penduduk	20
2. Kualitas Penduduk	22
a. Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan	22
b. Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan	29
c. Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi	31
3. Persebaran dan Mobilitas Penduduk	35
4. Pembangunan Keluarga	39
5. Data dan Informasi Kependudukan.....	41
BAB III PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN	
A. Penyusunan Proyeksi	45
B. Proyeksi dan Kondisi Ideal Kependudukan Karawang 2025-2045	49
1. Kuantitas Penduduk.....	49
2. Kualitas Penduduk.....	53
3. Persebaran dan Mobilitas Penduduk	59
4. Pembangunan Keluarga.....	61
5. Persebaran Data dan Informasi Kependudukan	62
BAB IV VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH	64
A. Visi dan Misi GDPK	64

B. Isu Strategis.....	65
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	71
A. Kuantitas Penduduk	71
B. Kualitas Penduduk	73
C. Persebaran dan Mobilitas Penduduk	76
D. Pembangunan Keluarga	78
E. Persebaran Data dan Informasi Kependudukan	79
BAB VI ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN.....	80
A. Roadmap Kuantitas Penduduk	81
B. Roadmap Kualitas Penduduk	82
C. Roadmap Persebaran dan Mobilitas Penduduk.....	86
D. Roadmap Pembangunan Keluarga	88
E. Roadmap Persebaran Data dan Informasi Kependudukan	89
BAB VII PENUTUP	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
Lampiran.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk Kabupaten Karawang	12
Tabel 2.2 Tingkat Kesuburan Umur dan Kelahiran Menurut Umur	16
Tabel 2.3. Pembangunan, Kependudukan dan Keluarga Berencana	20
Tabel 2.4. Jumlah Kematian Bayi, Kematian Balita, dan Kematian Ibu.....	21
Tabel 2.5. Jumlah Kematian Bayi, Kematian Balita, dan Kematian Ibu.....	25
Tabel 2.6 Indikator Lama Sekolah	29
Tabel 2.7 Angka Partisipasi Sekolah	30
Tabel 2.8 Tingkat Pengangguran dan Partisipasi Kerja	33
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Miskin	35
Tabel 2.10 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Karawang.....	36
Tabel 2.11 Migrasi Masuk-Keluar di Kabupaten Karawang.....	39
Tabel 2.12 Penduduk Pra Sejahtera dan Sejahtera	40
Tabel 2.13 Data dan Informasi Kependudukan.....	42
Tabel 3.1 Proyeksi fertilitas Penduduk.....	49
Tabel 3.2 Proyeksi Bangsa Kencana.....	50
Tabel 3.3 Proyeksi Mortalitas Penduduk	51
Tabel 3.4 Proyeksi Kualitas Kependudukan Bidang Kesehatan.....	54
Tabel 3.5 Proyeksi Kualitas Bidang Kependidikan	55
Tabel 3.6 Proyeksi Kualitas Bidang Ekonomi	57
Tabel 3.7 Proyeksi Persebaran Penduduk Per-Kecamatan.....	59
Tabel 3.8 Proyeksi Migrasi Masuk.....	61
Tabel 3.9 Proyeksi Pembangunan Keluarga	61
Tabel 3.10 Proyeksi Data dan Informasi Kependudukan.....	63
Tabel 6.1 Roadmap Indikator Pengendalian Kuantitas Penduduk	82
Tabel 6.2 Roadmap Indikator Peningkatan Kuanlitas Penduduk Bidang Kesehatan	84

Tabel 6.3 Roadmap Indikator Peningkatan Kuanlitas Penduduk Bidang Pendidikan.....	85
Tabel 6.4 Roadmap Indikator Peningkatan Kuanlitas Penduduk Bidang Ekonomi	86
Tabel 6.5 Roadmap Indikator Persebaran dan Mobilitas Penduduk.....	87
Tabel 6.6 Roadmap Indikator Pembangunan Keluarga.....	89
Tabel 6.7 Roadmap Indikator Data dan Informasi Penduduk	90

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Piramida Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2022	14
Grafik 2.2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	15
Grafik 2.3 Cakupan Keluarga Berencana Aktif	18
Grafik 2.4 Presentase Perkawinan Usia Anak	19
Grafik 2.5 Harapan Hidup	23
Grafik 2.6 Pravelensi Balita Gizi Buruk	24
Grafik 2.7 Presentase Prevalensi Stunting	27
Grafik 2.8 Presentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	28
Grafik 2.9 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	31
Grafik 2.10 Tingkat Pengeluaran Perkapita	32
Grafik 2.11 Presentase Rasio Ketergantungan	33
Grafik 2.12 Migrasi penduduk masuk di Kabupaten Karawang	38
Grafik 2.13 Kasus Perceraian di Kabupaten Karawang	41
Grafik 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Penduduk Total, Kab. Karawang 2024-2045	52
Grafik 3.2 Proyeksi Tingkat Kesuburan Umum 2025-2045	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan GDPK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan	10
Gambar 3.1	Hubungan Antara Lima Pilar GDPK	48
Gambar 6.1	Tahapan Tujuan Transformasi	80
Gambar 6.2	Tahapan Strategis Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	81
Gambar 6.3	Tahapan Strategis Peningkatan Kualitas Penduduk.....	83
Gambar 6.4	Tahapan Strategis Persebaran dan Mobilitas Penduduk.....	87
Gambar 6.5	Tahapan Strategis Pembangunan Keluarga.....	88
Gambar 6.6	Tahapan Strategis Data dan Informasi Kependudukan	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah pembangunan yang ideal menjadi faktor fundamental terhadap tercapainya sumber daya manusia yang berkelanjutan. Pembangunan dimaksud ialah pembangunan berkelanjutan terhadap pertumbuhan penduduk baik dari kualitas, kuantitas, dan persebaran untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan pengamalan dan cita-cita tersebut sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, faktor pembangunan menjadi penting untuk memperbaiki segala aspek dan dimensi kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain serta dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Mengutip pendapat Dao dan Van (2020), menyatakan hubungan antara penduduk dan lingkungan dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian, sebab pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan tekanan berat bagi lingkungan. Kegiatan yang melibatkan sumber daya demi industrialisasi berakibat pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan berwawasan kependudukan menjadi titik sentral yang meletakkan isu perkembangan penduduk sebagai fokus baik secara subyek maupun obyek, dalam rangka memperluas pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki pendidikan dan/atau keterampilan yang berkelanjutan. Mengingat kesadaran pembangunan berwawasan kependudukan yang terjadi diberbagaiwilayah (*problems of demography*) setempat, terutama laju jumlah penduduk yang

besar dan cenderung terus tinggi tentu saja dapat berimbas pada bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, dan pertahanan serta keamanan.¹

Persoalan lainnya tentang kependudukan terlihat pada ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas. Pada kuantitas jumlah penduduk yang besar dimaknai sebagai persoalan fasilitas daerah untuk menyediakan sandang, pangan dan papan bagi warganya. Sedangkan, dari sisi kualitas kemampuan sumber daya manusia pada persaingan dan produktivitas penduduk masih pada tingkatan yang rendah atau bahkan tertinggal jika dibandingkan pada daerah dengan tingkat fasilitas sarana dan prasarana yang sama. Dengan kata lain, persoalan terkait kualitas dan kuantitas penduduk akhirnya bukan hanya gambaran tentang kependudukan saja, namun menjadi persoalan penting dalam pembangunan secara menyeluruh baik tingkat Kementerian, Lembaga, dan Daerah. Sehingga agar tidak dipahami secara sempit yaitu sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi, akan tetapi sebagai sarana dan tujuan pembangunan kependudukan yang dipandang secara luas dengan capaian masyarakat yang sejahtera (*people welfare*) baik dimaknai secara fisik maupun non-fisik.²

Pencapaian tersebut juga dibutuhkan koordinasi antar sektor sebagai penanggungjawab fungsi kelembagaan masing-masing. Tahap awal tentu bermula pada perencanaan hingga implementasi agar meminimalisir ketidaksinkronan konsep dan implementasinya, disamping itu juga menghilangkan benturan antar kebijakan dan peraturan serta mereduksi kewenangan dan penafsiran terhadap penerapan kebijakan. Mengingat penanganan persoalan kependudukan lebih pada

¹ Suparman dkk, *Pembangunan Kependudukan Teori, Konsep, dan Studi Empiris*, (Jakarta, Publica Indonesia Utama: 2022), hlm 1-2.

² Ibid, hlm 4.

preferensi jangka panjang serta melihat sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka diperlukan pedoman *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai dasar dan landasan dalam penanganan persoalan kependudukan yang dapat terencana, sistemik, dan berkelanjutan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan bermula pada tahapan penyiapan yang termuat dalam kegiatan kajian teknis, inventarisasi aspirasi dan informasi sektoral, berlanjut pada diskusi terhadap perencanaan dan *consensus* hasil yang telah diidentifikasi dalam dokumen resmi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagai arah Pembangunan Daerah (*regional development*). Pembangunan Kependudukan yang berkelanjutan mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menjadikan penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan terhadap peningkatan kualitas SDM. Turunan aturan teknis sebagai acuan dalam pembuatan pedoman *Grand Design* Pembangunan Kependudukan ini pada Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Penduduk. Rencana pembangunan pada aspek kependudukan berisi 5 pilar yang menjadi penting sebagai alat bantu dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, sebagai arah tujuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Bappeda berkerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Karawang serta perangkat daerah terkait pada tahun 2024 akan menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karawang Tahun 2025-2045 sebagai suatu perencanaan dan acuan yang nantinya menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dan mitra

kerja dalam penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Karawang. Melihat kondisi Kabupaten Karawang yang diinginkan dengan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terukur.

B. Tujuan dan Sasaran

Dasar tujuan dibentuk GDPK ini untuk “Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, struktur dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup baik berupa sumber daya dan daya tampung lingkungan, termasuk kondisi perkembangan sosial dan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk mendukung visi pemerintahan Kabupaten Karawang”, Adapun tujuan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk secara efektif, efisien proposional, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan;
2. Menyusun arah kebijakan dan strategis dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas penduduk dan jaminan sosial komprehensif;
3. Menyusun arah kebijakan dan strategis dalam penyelenggaraan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;
4. Menyusun arah kebijakan dan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga;
5. Menyusun arah kebijakan dan strategis dalam penyelenggaraan penataan data dan informasi kependudukan serta pencatatan administrasi kependudukan;
6. Mengsinkronisasikan dan harmonisasi rencana Pembangunan kependudukan lintas sektor;

Sedangkan sasaran dari penyusunan GDPK ini, yakni:

1. Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Karawang berbasis pada kependudukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mencapai Pembangunan yang berkualitas;
2. Tercapainya keberhasilan pemanfaatan bonus demografi melalui pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga;
3. Terwujudnya database kependudukan dan pencatatan sipil yang presisi dan terintegrasi lintas sektor.

C. Pengertian, Kedudukan, Ruang Lingkup dan Pendekatan Pembangunan GDPK

1. Batasan Pengertian

Berdasarkan buku Panduan Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan 5 pilar (BKKBN 2020), ada beberapa hal yang menjadi penjabaran terkait dengan pengertian dalam Grand Design Kependudukan Kabupaten Karawang tahun 2025-2045, yaitu:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Asumsi proyeksi adalah faktor penentu pertumbuhan penduduk di daerah mengikuti kecenderungan data atau kondisi yang diinginkan.

-
3. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
 4. Diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan informan yang memiliki karakteristik yang setara.
 5. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam *roadmap* Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
 6. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok Perempuan.
 7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
 8. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
 9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
 10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas,

tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai 5 manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

11. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
12. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
14. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

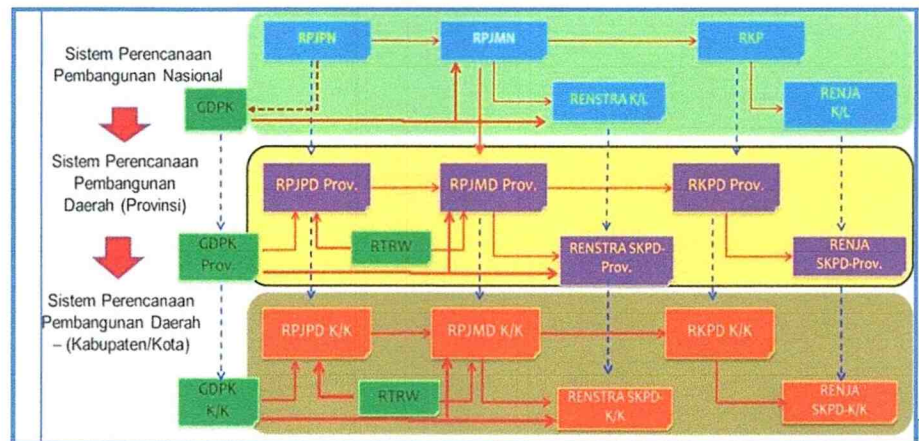
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
19. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
20. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
21. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
22. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

23. Peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
24. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
25. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
26. Roadmap merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat living document dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

2. Kedudukan GDPK

Pada buku Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar (BKKBN 2020), GDPK merupakan kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi, arahan, kebijakan, tujuan dan sasaran di bidang Pembangunan yang terdapat pada 5 pilar pembangunan serta uraian yang akan dijelaskan lebih mengerucut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD).



Sumber: Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar (BKKBN 2020)

Gambar 1.1 Kedudukan GDPK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

3. Ruang Lingkup GDPK

Ruang lingkup yang menjadi batasan dari Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karawang tahun 2025-2045 meliputi analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan untuk melihat kondisi kependudukan teraktual. GDPK juga menjadi proyeksi kependudukan, visi dan misi, pembangunan kependudukan, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta *roadmap* Pembangunan kependudukan yang akan menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyusun dokumen kebijakan pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan kependudukan selama 25 (dua puluh lima) tahun ke depan.

4. Pendekatan Penyusunan GDPK

Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karawang tahun 2025-2045 diawali dengan melakukan kajian dokumen kebijakan, kajian program unggulan, kajian akademik dan pelaksanaan program di bidang kependudukan. Berdasarkan analisis yang dikaji dapat

memproyeksikan kondisi kependudukan 25 (dua puluh lima) tahun ke depan, serta menyusun visi dan misi, strategi, arah kebijakan, dan *roadmap* pembangunan kependudukan untuk menjadi acuan perencanaan pembangunan kependudukan 25 (dua puluh lima) tahun ke depan. Tahapan yang dilalui bisa melalui diskusi/konsultasi/*Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pihak terkait.

BAB II

ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

A. Analisis Situasi Kependudukan

Analisis situasi kependudukan berdasarkan melihat aspek 5 pilar pembangunan kependudukan meliputi: Kuantitas Penduduk, Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, dan Data dan Informasi Kependudukan.

1. Kuantitas Penduduk

a. Pertumbuhan Penduduk dan Fertilitas

Berdasarkan laporan tahun 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang, jumlah penduduk Kabupaten Karawang sebanyak 2.505.250 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak berada pada wilayah Kecamatan Klari yaitu sebanyak 204.790 jiwa atau 8.17 persen. Sebaliknya jumlah penduduk paling sedikit yaitu berada di Kecamatan Tegalwaru dengan jumlah sebanyak 40.000 jiwa atau 1.60 persen. Berdasarkan presentase kepadatan penduduk pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk Kabupaten Karawang

Kecamatan	2018		2019		2020		2021		2022	
	Jiwa (ribu)	%	Jiwa (ribu)	%	Jiwa (ribu)	%	Jiwa (ribu)	%	Jiwa (ribu)	%
Pengkalan	38.6	1.66	38.2	1.64	38.4	1.63	41.2	1.67	41.9	1.67
Tegalwaru	37.4	1.61	37.1	1.6	37.6	1.59	39.4	1.6	40	1.6
Ciampel	43.2	1.85	42.9	1.85	44.1	1.87	44.5	1.87	45.1	1.8
Telukjambe Timur	138.9	5.95	133.2	5.73	135.9	5.76	134.4	5.45	135.3	5.4

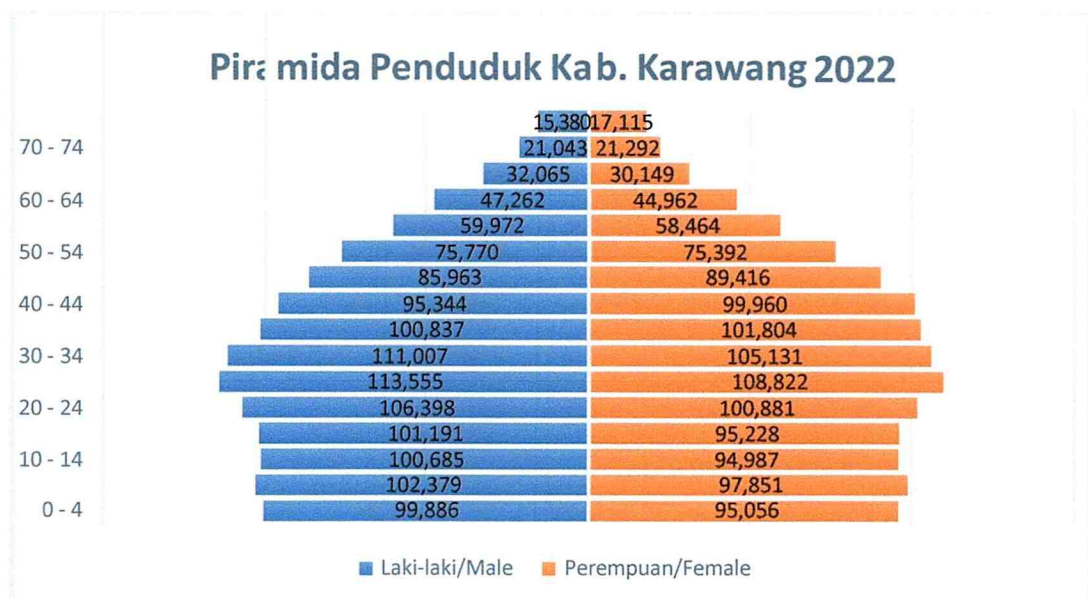
Telukjambe Barat	53.5	2.29	54.6	2.35	54.9	2.33	56.1	2.27	56.8	2.27
Klari	170.5	7.3	176.6	7.6	181.1	7.67	200	8.1	204.7	8.17
Cikampek	117.4	5.03	113.9	4.9	115.3	4.89	120.7	4.89	122.2	4.88
Purwasari	69.4	2.97	73.3	3.15	75.9	3.22	81.4	3.31	83.7	3.34
Tritamulya	48.6	2.08	49.4	2.12	49.6	2.1	50.6	2.05	51.2	2.05
Jatisari	79	3.38	78.3	3.37	78.5	3.33	81.4	3.3	82.4	3.29
Banyusari	56	2.4	55.8	2.4	55.4	2.35	56.7	2.3	57.3	2.29
Kotabaru	131.4	5.63	128.1	5.51	131.1	5.55	139.2	5.64	141.2	5.64
Cilamaya Wetan	82.6	3.54	77.6	3.34	78.2	3.32	80.9	3.28	81.5	3.26
Cilamaya Kulon	65.6	2.81	63.8	2.75	64.5	2.73	66.6	2.7	67.4	2.69
Lemahabang	66.7	2.86	64.6	2.78	64.7	2.74	66.8	2.71	67.4	2.69
Telagasari	66	2.83	67.9	2.92	68.1	2.89	69.7	2.82	70.7	2.82
Majalaya	48.3	2.07	61.9	2.66	64.5	2.73	76.5	3.1	80.4	3.21
Karawang Timur	129.5	5.55	143.1	6.16	146.3	6.2	155.7	6.31	159.7	6.38
Karawang Barat	170.6	7.31	160.5	6.91	161.5	6.84	165.7	6.71	166.8	6.66
Rawamerta	53.4	2.29	54.1	2.33	53.6	2.27	54.7	2.22	55.3	2.21
Tempuran	64.3	2.75	64.9	2.79	64.9	2.75	65.7	2.66	66.4	2.65
Kutawaluya	58.9	2.53	58	2.5	59	2.5	61.3	2.49	62.1	2.48
Rengasdengklok	114.7	4.91	108	4.65	109.7	4.65	117.2	4.75	118.6	4.73
Jayakarta	65.7	2.82	63.4	2.73	65.5	2.78	68	2.76	68.9	2.75
Pedes	77	3.3	76.3	3.28	78.1	3.31	79.8	3.23	80.8	3.23
Cilebar	43.2	1.85	43.5	1.87	43.4	1.84	45.4	1.84	46.1	2.84
Cibuaya	53.4	2.29	51	2.2	52	2.2	53.8	2.18	54.4	2.17
Tirtajaya	67.9	2.91	68.1	2.93	70.1	2.97	70.8	2.87	71.7	2.86
Batujaya	82.7	3.4	76.6	3.29	77.9	3.3	81.5	3.3	82.2	3.28
Pakisjaya	40.1	1.72	39	1.68	39.8	1.69	41.1	1.67	41.6	1.66

Sumber: BPS, Karawang Dalam Angka.

Jumlah penduduk berdasarkan setiap kecamatan yang tidak merata akan menimbulkan berbagai persoalan, misalnya jumlah penduduk yang meningkat pada kecamatan tertentu akan berimbas pada kualitas penduduk itu sendiri,

pada fasilitas pelayanan umum hingga pada pemenuhan penanganan kesehatan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk, preferensi kawasan yang tidak tertata akan berdampak menimbulkan kawasan kumuh baru.

Jumlah penduduk berdasarkan gender pada usia tertentu baik antara laki-laki dan perempuan terhadap seberapa besar pada tahun tersebut. Ini sebagai pemetaan terhadap kebijakan pemerintah terhadap kebutuhan dan penanganan pada setiap kelompok yang berbeda.



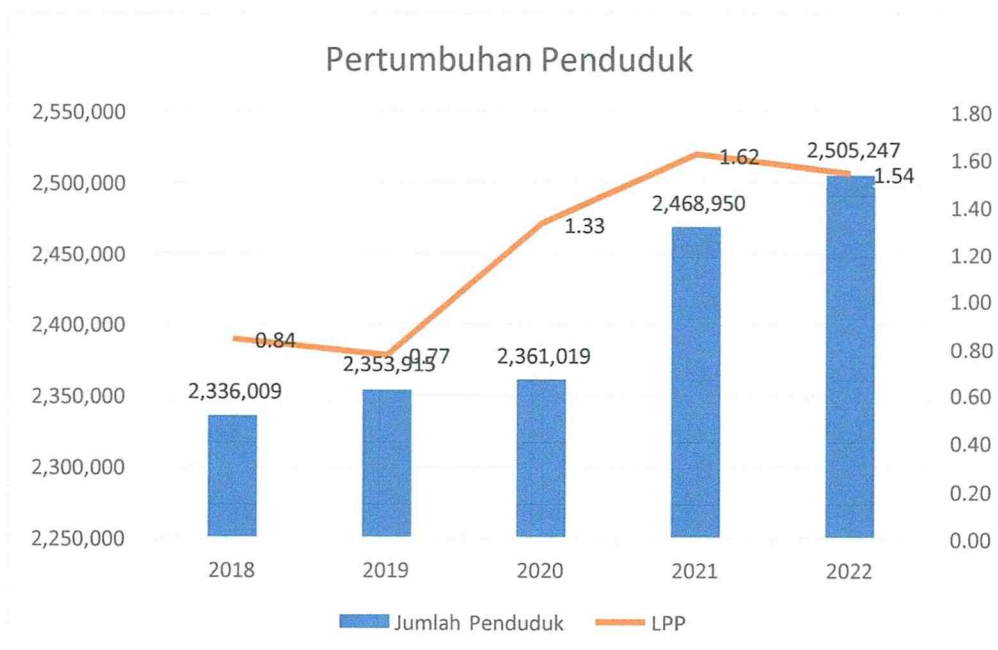
Sumber: BPS, Karawang Dalam Angka (2023)

Grafik 2.1. Piramida Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2022

Bila melihat dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan gender di Kabupaten Karawang tahun 2022 (gambar 1.1), tampak bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat pada kelompok usia 25-34 tahun yang merupakan usia produktif. Usia produktif menjadi tujuan Pemerintah terhadap pemanfaatan untuk menjadi wilayah yang produktif, disisi lain

adanya tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk dapat mengelola agar memberikan dampak positif bagi perekonomian khususnya pemberdayaan masyarakat Karawang. Sehingga dapat meningkatkan daya serap terhadap pengangguran yang berimbas pada sektor ekonomi, jika tidak sebaliknya justru akan memberikan efek beban terhadap Pemerintah Daerah terhadap pengangguran pada kelompok usia produktif.

Jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang mengalami peningkatan jika melihat lima tahun kebelakang, hal ini tidak terlepas dari banyaknya angka kelahiran yang terjadi. Di sisi lain, Karawang merupakan kota yang dekat dengan Ibukota, sehingga tidak dapat dipungkiri menarik pendatang untuk berpindah ke Karawang.



Sumber: BPS, Karawang dalam Angka

Grafik 2.2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020-2022 di Kabupaten Karawang sebesar 1.49 persen. Angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Penyebab tingginya jumlah penduduk yang terus meningkat ialah adanya angka kelahiran yang terus naik, sehingga berdampak jumlah penduduk yang terus konsisten naik. Namun upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali perlu dibarengi dengan strategi kebijakan terhadap pengendalian kuantitas penduduk yang seimbang dan terukur.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan angka yang menunjukkan penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu, sehingga dalam hal ini setiap tahunnya akan berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang bertambah. Melihat gambar di atas masih adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Karawang. Tingkat kesuburan umum jugaberimbans pada bertambahnya jumlah penduduk. Sebagaimana pada tabel 2.2 terkait tingkat kesuburan dan angka kelahiran lahir menurut usia sebagaiberikut:

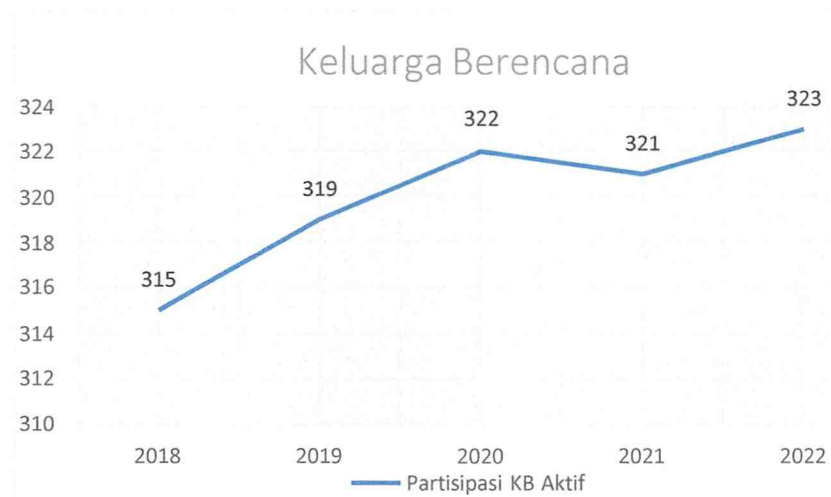
Tabel 2.2 Tingkat Kesuburan Umur dan Kelahiran Menurut Umur

Variabel	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Kesuburan Umum/ Total Fertility Rate (TFR) (%)	2.23	2,25	2,22	2.22	2,22
Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur/ Age Specific Fertility Rate (ASFR)	445.77	449.9	449,7	444.4	444

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)

Tingkat kesuburan menggambarkan bahwa seberapa tinggi terhadap jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang Perempuan dalam rentang usia tertentu, sehingga dalam hal ini menunjukkan jumlah populasi ke depan seberapa tinggi jumlah populasi di daerah tersebut akan bertambah. Tingkat kesuburan yang terdapat di Karawang secara rerata masih di atas 2 persen, pada tahun selanjutnya stabil pada angka 2.22. bila melihat capaian Nasional pada tahun yang sama 2022 angkanya sebesar 2.1 persen. Pada RPJMN 2024 Pemerintah menargetkan pada level 2.1 persen, Angka tingkat kesuburan umum (TFR) di Karawang masih lebih tinggi jika dibandingkan capaian di provinsi Jawa Barat. Adapun angka kelahiran jika melihat data angka kelahiran menurut Umur (pada tabel 2.2) digunakan sebagai pola kelahiran Perempuan terhadap usia tertentu dengan jumlah total penduduk perempuan di wilayah tersebut berdasarkan data selama 5 tahun terakhir.

Adapun kecakupan kepesertaan Keluarga Berencana adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasang usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan atau keguguran. Adapun tujuannya untuk melihat kepesertaan KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi, berdasarkan data 5 tahun terakhir (grafik 2.3) dari tahun 2018-2022 sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Karawang

Grafik 2.3 Cakupan Keluarga Berencana Aktif

Peranan masyarakat dalam membentuk keluarga berencana penting guna menjadi tolak ukur terhadap peningkatan pertumbuhan penduduk disetiap keluarga, pada data di atas menunjukkan partisipasi keluarga berencana aktif memberikan gambaran terhadap pemahaman setiap keluarga untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran, sehingga diharapkan dapat membentuk keluarga yang ideal. Selain itu jumlah presentase terhadap perkawinan usia anak juga menjadi element penting dalam hal cakupan keluarga berencana. Perkawinan usia anak merupakan perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang belum mencapai usia yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data (grafik 2.4) diambil 5 tahun kebelakang dari tahun 2018- 2022 sebagai berikut:



Sumber: DP3A dan Kemenag Karawang

Grafik 2.4 Presentase Perkawinan Usia Anak

Pada data di atas menunjukkan terhadap presentase perkawinan usia anak yang fluktuatif, mengingat usia perkawinan anak diharapkan kian menurun, agar terhadap tumbuh dan kembang anak terutama dari aspek akses pendidikan, aspek kesehatan dan aspek ekonomi sehingga tidak menimbulkan kemiskinan baru atau dampak lain secara psikologis terhadap emosional serta kesiapan dan pengetahuan yang dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat pada perceraian.

Adanya kebijakan program Bangga Kencana merupakan inisiasi dalam hal program pengendalian terhadap fertilitas dengan berbagai upaya yang tidak lepas dari capaian pertumbuhan penduduk yang seimbang dan ideal. Sebagaimana data (pada tabel 2.3) sebagai berikut:

Tabel 2.3. Pembangunan, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Variabel	2018	2019	2020	2021	2022
1) mCPR (Pengguna Alat Kontrasepsi Modern = %)	72.02	73.48	71.81	72.07	70.02
2) MKJP (Alat Kontrasepsi jangka panjang)	49,527.0	55,812.0	41,013.0	61,774.0	52,031.5
a. IUD (orang)	18,055	20,003	21,476	23,304	20,808
b. MOW (orang)	9,251	9,685	9,970	10,782	10,112
c. MOP (orang)	2,669	2,549	2,444	2,370	1,615
d. Implant (orang)	19,602	23,575	26,453	28,619	24,000
3) Unmet Need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	12.39	10.72	12.39	12.39	14.05

Sumber: DPPKB dan diolah

Indikator terhadap standart pembangunan kelaurga melalui program Bangga Kencana sebagai strategi kebijakan yang bertujuan mengatur angka kelahiran (TFR) melalui alat kontrasepsi terhadap pasangan keluarga. Upaya melalui alat kontrasepsi yang dilakukan kepada masyarakat baik terhadap laki-laki atau perempuan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan mengarahkan bagaimana perencanaan terhadap kelahiran (anak) dan membentuk keluarga yang ideal.

b. Mortalitas Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk yang seimbang tentu juga harus melihat tidak hanya pada satu sisi saja, Namun perlu juga melihat jumlah angka mortalitas sebagai acuan terhadap upaya jumlah penduduk yang seimbang

dan terukur. Indikator mortalitas penduduk meliputi kematian bayi, kematian balita, dan kematian ibu. Angka mortalitas menunjukkan jumlah kematian dari masing-masing usia baik itu bayi, balita bahkan pada Ibu yang pada saat mengandung hingga pasca melahirkan, sebagaimana berdasarkan data (pada tabel 2.4) pada tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Jumlah Kematian Bayi, Kematian Balita, dan Kematian Ibu

Variable	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Bayi/Infant Mortality Rate (IMR)	162	157	136	160	178
Angka Kematian Balita (Childhood Mortality Rate-CMR)	9	4	8	11	4
Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate-MMR)	43	45	60	117	52

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karawang

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan terhadap Angka Kematian Bayi/*Infrant Mortality Rate*, dimulai sejak tahun 2018 sejumlah 162 bayi, 2019 sejumlah 157 bayi, 2020 sejumlah 136 bayi, 2021 sejumlah 160 bayi, dan pada tahun 2022 sejumlah 178. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas menunjukkan dalam 5 tahun terakhir angka kematian bayi/*Infrant Mortality Rate* menggambarkan adanya jumlah yang belum stabil yang seharusnya menurun, target Nasional terhadap angka kematian bayi pada tahun 2022

mencapai 18.6 persen per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan jumlah Angka Kematian Balita berdasarkan tabel di atas memperlihatkan jumlah setiap tahunnya masih juga belum stabil. Penentuan terhadap *total fertility rate* (TFR) menjadi dasar sebagai salah satu komponen dalam melakukan perhitungan terhadap mortalitas sehingga dapat mengukur seberapa besar pertumbuhan dan kematian pada tahun tersebut. Namun tidak terlepas dari jumlah Angka Kematian Balita terhadap angka kematian Ibu yang juga menjadi perhatian tersendiri.

Mengingat jumlah angka terhadap kematian Ibu berdasarkan tabel di atas adanya kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Hal ini dapat berdasarkan berbagai faktor terhadap kematian ibu yang terjadi pada saat kehamilan, persalinan, pasca persalinan. Capaian target jika melihat RPJPN tahun 2045 mencapai 16 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini dapat menjadikan acuan terhadap keberlangsungan pada jumlah Total Fertility Rate (TFR) untuk mengukur seberapa besar rata-rata jumlah anak (laki-laki dan perempuan) yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduktifnya.

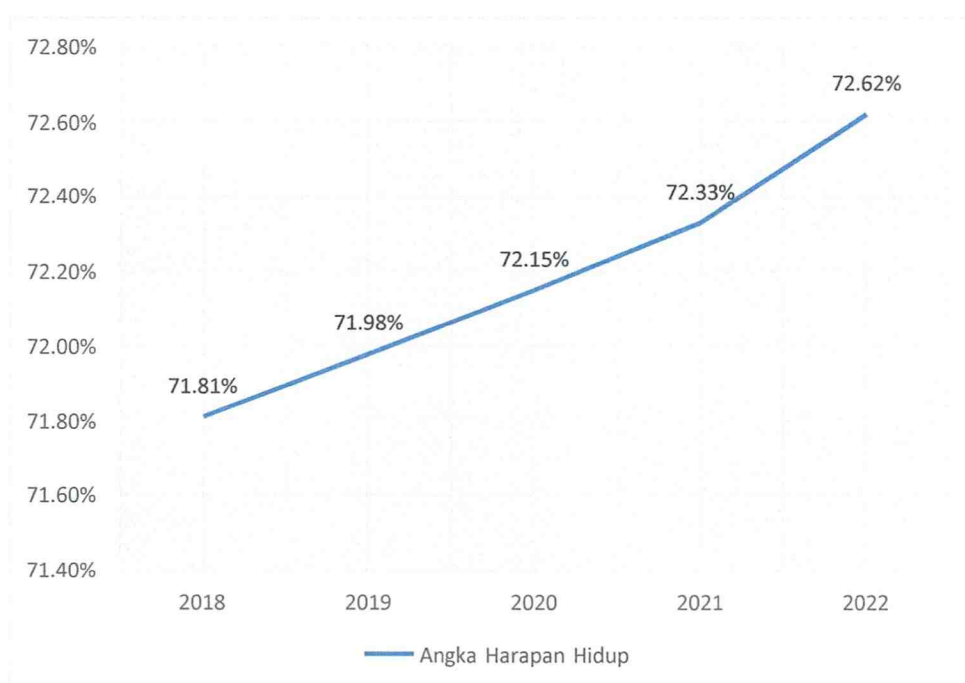
2. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk dilihat dari 3 bidang yaitu Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, dan Bidang Ekonomi. Dalam hal ini setiap bidang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan

Melihat setiap aspek dalam bidang Kesehatan yang mencakup harapan hidup dan balita gizi buruk (*stunting*). Harapan hidup merupakan

kesempatan atau waktu hidup yang tersisa, maka dapat diartikan sebagai usia yang dapat ditempuh oleh penduduk yang masih hidup sampai dengan batas usia tertentu. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Karawang terhadap angka harapan hidup penduduk sebagai berikut:



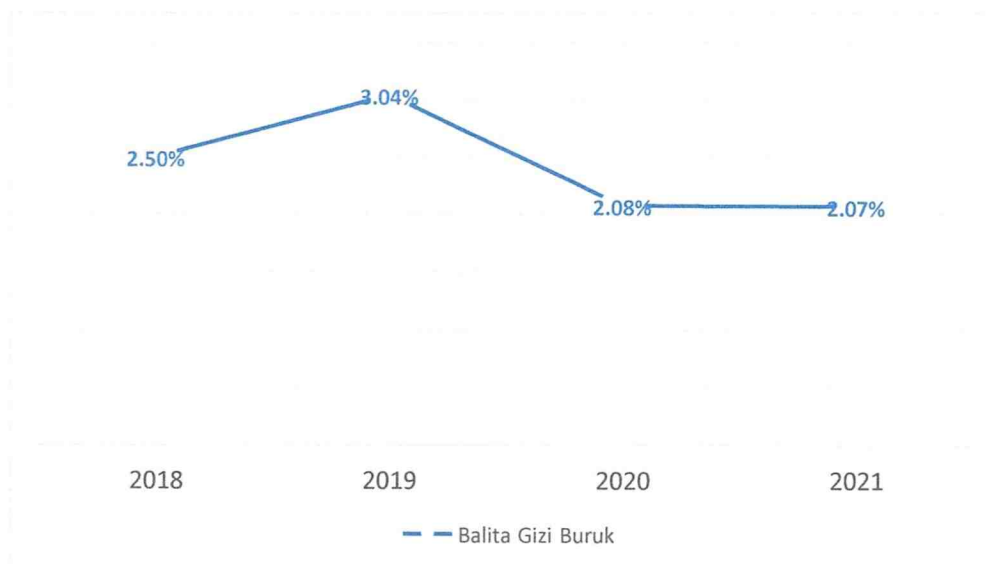
;Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karawang

Grafik 2.5 Harapan Hidup

Pada data di atas (grafik 2.5) angka harapan hidup penduduk mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa penduduk dengan batas usia sampai dengan usia tertentu semakin bertambah. Jika melihat data yang Nasional pada realisasi harapan hidup pada tahun 2022 mencapai 71,85, hal ini bila melihat angka harapan hidup di Kabupaten Karawang sudah di atas dari rata-rata capaian nasional.³ Sedangkan disisi lain kebutuhan pemenuhan gizi terhadap anak menjadi faktor pendukung pada

³ <https://dataindonesia.id/varia/detail/umur-harapan-hidup-di-indonesia-sebesar-7185-tahun-pada-2022>. Diakses 12 November 2023

angka harapan hidup penduduk. Menurut UNICEF terdapat tiga penyebab gizi buruk pada anak yaitu penyebab langsung, penyebab tidak langsung dan penyebab dasar. Adapun penyebab langsung gizi buruk yaitu asupan gizi yang kurang dan penyakit infeksi. Kurangnya asupan gizi dapat disebabkan karena terbatasnya asupan makanan yang dikonsumsi atau makanan yang tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan. Sedangkan infeksi menyebabkan rusaknya beberapa fungsi organ tubuh sehingga tidak bisa menyerap zat-zat makanan secara baik. Penyebab tidak langsung gizi buruk yaitu tidak cukup pangan, pola asuh yang tidak memadai dan sanitasi, air bersih/ pelayanan kesehatan dasar yang tidak memadai.⁴ Berdasarkan data Dinas Kesehatan terhadap angka balita gizi buruk dari tahun 2018-2022 sebagai berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karawang

Grafik 2.6 Prevalensi Balita Gizi Buruk

⁴ Silvia Rope H. dan Nadiroh, "Masalah Gizi Buruk Mengakibatkan Stunting di Indonesia", Jurnal Human Nutrition, Juni 2019, hlm 2.

Melihat data di atas (grafik 2.6) pemenuhan terhadap gizi buruk pada 2019 terjadi kenaikan menjadi 3.04, hal ini dipengaruhi pada keadaan kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi. Namun pada tahun selanjutnya terjadi penurunan yang cukup signifikan, meskipun pada tahun tersebut penurunannya masih cukup minim. Jika jumlah prevalensi gizi buruk terus meningkat maka dapat berdampak pada munculnya stunting baru. Pada kualitas bidang kesehatan menjadi indikator pada aspek mortalitas berupa angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian Ibu, berdasarkan data (pada Tabel 2.5) dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.5. Jumlah Kematian Bayi, Kematian Balita, dan Kematian Ibu

Variable	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Bayi/Infant Mortality Rate (IMR)	162	157	136	160	178
Angka Kematian Balita (Childhood Mortality Rate-CMR)	9	4	8	11	4
Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate-MMR)	43	45	60	117	52

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karawang

Melihat tabel di atas menjadi tolak ukur kualitas terhadap sarana dan prasana terhadap resiko jumlah kematian terhadap laju tumbuhnya penduduk. Disisi lain, terhadap jumlah kematian balita yang rentan usia 5 tahun ke bawah menjadi gambaran terhadap kualitas hidup balita.

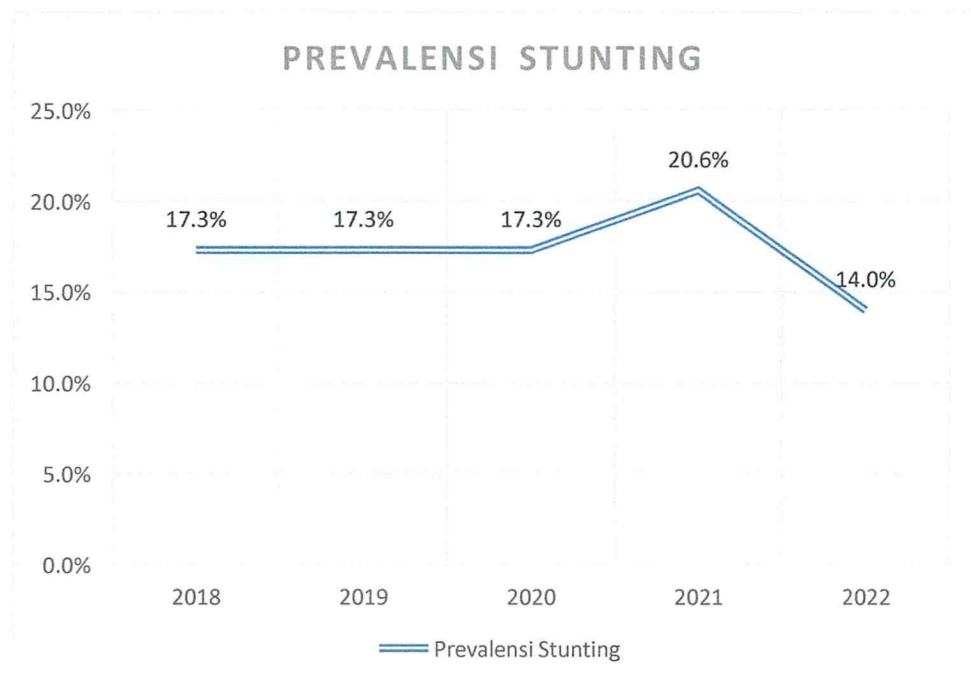
Upaya terhadap peningkatan kualitas termasuk pada angka kematian ibu (AKI) melalui cara yang secara intervensi spesifik dilakukan saat dan sebelum melahirkan, capaian yang harus dilakukan dengan melihat target secara Internasional dan Nasional, merujuk pada Data BPS yang dirilis AKI untuk wilayah Provinsi Jawa Barat sebesar 148. Berdasarkan target *Sustainable Development Growth* AKI yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.⁵

Data menurut Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Karawang sudah lebih rendah dari rata-rata wiliayah Provinsi Jawa Barat, meskipun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan DKI Jakarta yang mencapai angka 48, melihat pada capaian target WHO AKI di Kabupaten Karawang sudah di bawah dari angka target Internasional.

Upaya percepatan perbaikan gizi merupakan hal yang serius bagi Indonesia maupun Internasional, serta semua negara yang memiliki permasalahan pada pemenuhan gizi (*stunting*). Upaya yang diinisiasi oleh *World Health Assembly* memiliki target dalam upaya penurunan prevalensi *stunting* antara lain untuk menurunkan prevalensi *stunting* *wasting* dan

⁵ <https://rejogja.republika.co.id/berita/rz4nur291/menurunkan-angka-kematian-ibu>, diakses 11 November 2023

mencegah terjadinya *overweight* pada balita, menurunkan prevalensi anemia pada wanita usia subur, menurunkan prevalensi bayi berat lahir rendah (BBLR), dan meningkatkan cakupan ASI eksklusif. Indonesia sebagai anggota PBB dengan prevalensi *stunting* yang tinggi perlu berkomitmen kuat dalam upaya percepatan perbaikan gizi di masyarakat dengan melaksanakan “*Scaling Up Nutrition (SUN)*”. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) dari tahun 2018-2022 sebagai berikut:



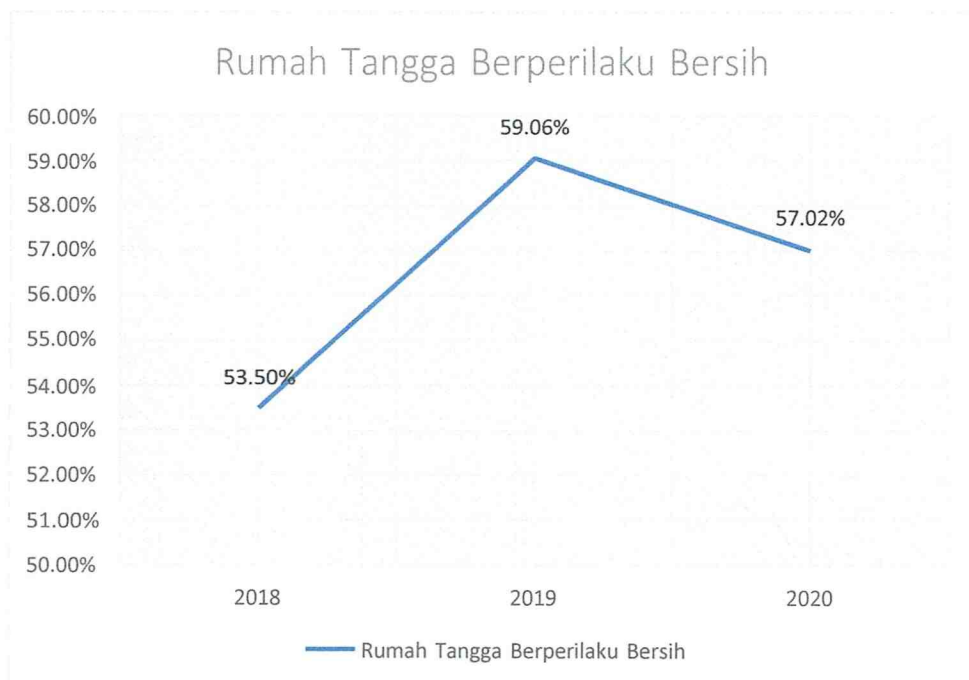
Sumber: Riset Kesehatan Dasar (Riskedas)

Grafik 2.7 Presentase Prevalensi Stunting

Capaian target dalam penurunan stunting di wilayah Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 20,2 persen, angka tersebut masih lebih rendah pada prevalensi *stunting* di Kabupaten Karawang sebesar 14 persen. Secara Nasional capaian target pemerintah pada tahun 2024 terhadap angka *stunting* 14 persen, artinya capaian di Kaabupaten Karawang sudah

terpenuhi pada tahun ini. Adapun capaian ini sangat baik jika dibandingkan angka prevalensi di Karawang.

Mewujudkan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi pendukung terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas. Melihat tolak ukur masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat jika semakin tinggi angka tersebut diasumsikan masyarakat semakin melakukan pola hidup yang bersih dan sehat. Berdasarkan data pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang tahun 2021 sebagai berikut:



Sumber: RPJMD Kabupaten Karawang 2021

Grafik 2.8 Presentasi Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)

Pola perilaku hidup bersih di masyarakat dalam rumah tangga masih memperlihatkan angka yang belum stabil, harapan perilaku hidup bersih

ini kian meningkat agar bertujuan tidak terdapat tempat yang kumuh dan menimbulkan penyakit tertentu yang berasal dari pola hidup dan tempat tinggal yang tidak bersih.

b. Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan

Pada bidang Pendidikan, kualitas dapat dilihat dari lamanya sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS) mulai tingkat dasar hingga sekolah tingkat menengah atas. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang Pendidikan formal. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga pada tahun 2018-2022 pada tabel 2.6 di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.6 Indikator Lama Sekolah

Variabel	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Lama Sekolah (%)	7.35	7.65	7.77	7.78	7.96
Harapan Lama Sekolah (%)	12,07	12,08	12,09	12.1	12.19

Sumber: Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Karawang

Pada data di atas (tabel 2.6) menampilkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk mencapai batas jenjang pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Adapun capaian Nasional yang ditetapkan setiap tahunnya lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Karawang. Hal ini menandakan capaian Kabupaten Karawang terhadap rata-rata lama sekolah belum optimal sesuai dengan capaian target secara Nasional pada tahun

2022 sebesar 8.96 persen. Jika melihat secara berjenjang terhadap angka partisipasi baik dari tingkat dasar hingga tingkat sekolah menengah ke atas berdasarkan (pada Tabel 2.8) pada tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.7 Angka Partisipasi Sekolah

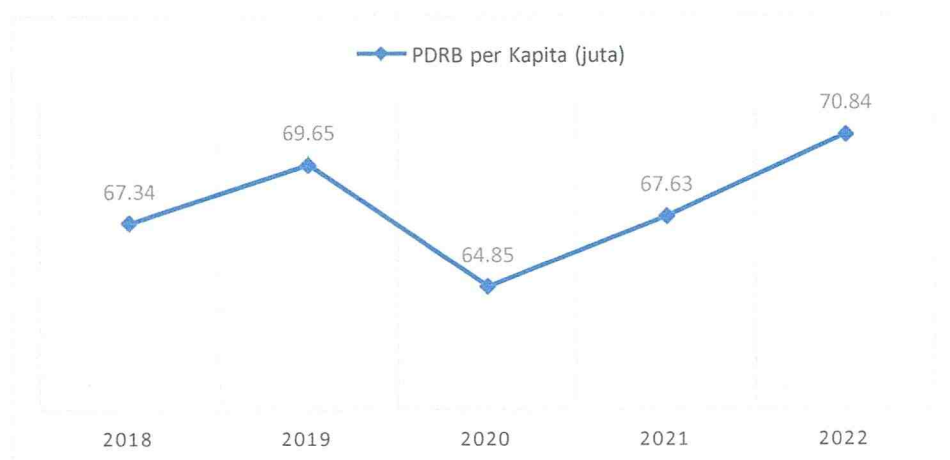
Variabel	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi SD/MI (%)	107.66	105.91	104	104	103.63
Angka Partisipasi SMP/MTs (%)	86.32	87.66	88	88	89.49
Angka Partisipasi SMA/MA/SMK (%)	76.41	81.57	81.72	81.72	79.97

Sumber: Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Karawang

Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah ke atas mengalami penurunan di masyarakat. Hal ini perlu dilihat terhadap faktor penurunan yang berdampak terhadap partisipasi sekolah ke jenjang berikutnya yang kian menurun, akses partisipasi masyarakat terhadap sekolah seharusnya adanya peningkatan yang stabil melihat perihal tujuan dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan sekolah pada usia 7 tahun hingga 12 tahun.

c. Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi

Pada bidang ekonomi terhadap kualitas penduduk dapat dilihat dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengeluaran perkapita, dan jumlah penduduk miskin, sebagai gambaran keadaan kemampuan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Dalam hal ini akan diuraikan melalui grafik data berdasarkan data BPS dari lima tahun terakhir (2018-2022) sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Karawang

Grafik 2.9 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Jika melihat grafik di atas terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan tingkat regional terhadap kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada waktu tertentu. Hal ini juga berhubungan dengan tingkat pengeluaran perkapita disuatu wilayah berdasarkan data dari BPS mulai tahun 2018 sampai tahun 2022 sebagai berikut:



Sumber: BPS Kab. Karawang

Grafik 2.10 Tingkat Pengeluaran Perkapita

Berdasarkan data di atas menunjukkan terhadap tingkat pengeluaran terdapat penurunan pada tahun 2020, namun pada tahun selanjutnya terjadi peningkatan, hal ini juga dipengaruhi terhadap kondisi perekonomian yang pada tahun tersebut terjadi penurunan secara nasional disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Faktor rasio ketergantungan juga berpengaruh terhadap berkembangnya suatu ekonomi, Rasio Ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk biaya hidup terhadap usia belum produktif dan tidak lagi produktif. Jika semakin tinggi rasio ketergantungan maka akan semakin berat beban pada usia produktif yang menanggungnya, begitupun sebaliknya. Rasio ketergantungan sebagai berikut:



Sumber: RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026

Grafik 2.11 Presentase Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan secara Nasional pada tahun 2020 sebesar 44.33 persen, jika dibandingkan dengan Kabupaten Karawang rasioketergantungan masih di atas angka Nasional. Namun demikian, pengaruh terhadap rasio ketergantungan juga dapat dilihat terhadap tingkat pengeluaran perkapita disuatu wilayah yang juga mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan data BPS (tabel 2.8) tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.8 Tingkat Pengangguran dan Partisipasi Kerja

Variabel	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,05	9,61	11,52	11,83	9,83
Tingkat Partisipasi Angkatan	64,77	63,6	64,9	64,19	65,51

Kerja (TPAK) (%)					
-------------------------	--	--	--	--	--

Sumber: Badan Pusat Statistik Karawang Dalam Angka

Angka tingkat Pengangguran Nasional (TPT) sebesar 5,3% pada tahun 2023, jika dilihat TPT di Jawa Barat per-Agustus 2023 angkanya sebesar 7.44%. Angka tersebut terbilang masih tinggi jika dibandingkan Nasional dan Provinsi pada target capaian penurunan TPT hingga 5,3%. Berdasarkan TPT di Kabupaten Karawang terbilang angkanya masih tinggi dibanding dengan target Provinsi dan Nasional. sedangkan TPT berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang rendah bila masih tingginya pengangguran terbuka. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih relatif rendah jika dibandingkan dengan capaian yang harus dicapai secara Nasional pada tahun 2024 sebesar 68,31% dengan proyeksi meningkat sebanyak 146.317.343 orang.⁶

Tingkat kemiskinan merupakan masalah sosial yang serius, dimana ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar, sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau garis kemiskinan sesuai standar hidup. Berdasarkan data (tabel 2.9) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang pada 5 tahun terakhir sejak 2018-2022 sebagai berikut:

⁶ Kementerian Ketenagakerja RI, "Review Rencana Tenaga Kerja Nasional 2020-2024", (Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; Jakarta, 2021).; Jakarta, 2021).

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Miskin

Tahun	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2018	187.9	8.06%
2019	173.6	7.39%
2020	195.4	8.26%
2021	210.7	1.20%
2022	199.9	2.70%

Sumber: BPS, Karawang Dalam Angka 2023

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami kenaikan, ditambah dipengaruhi peningkatan jumlah tertinggi pada 2020-2021 dengan seiring adanya Pandemic Covid-19. Disisi lain banyak penduduk juga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak pada daya beli masyarakat semakin menurun dan kebutuhan dasar tidak dapat terpenuhi, sehingga masyarakat yang rentan miskin semakin masuk pada penduduk miskin.

3. Persebaran dan Mobiltas Penduduk

Kepadatan Penduduk Per-kecamatan sebagai pemetaan rata-rata penyebaran dan peningkatan jumlah penduduk disetiap wilayah desa di Kabupaten Karawang. Berdasarkan data BPS Karawang terhadap presentase penduduk dan cakupan wilayah disetiap kecamatan dapat dilihat (tabel 2.10) sebagai berikut:

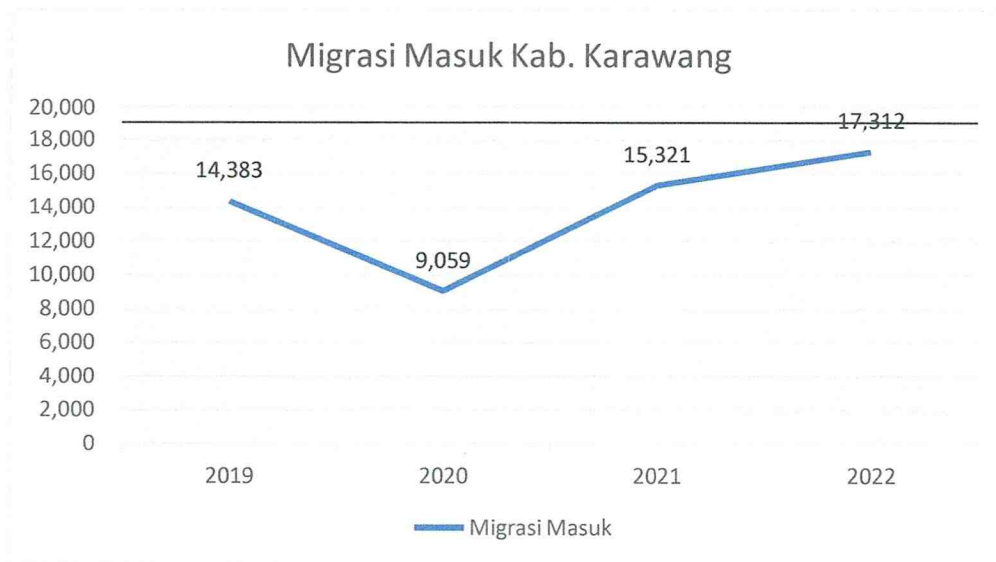
Kutawaluya	2.48	1,133
Rengasdengklok	4.73	3,044.9
Jayakarta	2.75	1,570.1
Pedes	3.23	1,232.9
Cilebar	1.84	629
Cibuaya	2.17	458.9
Tirtajaya	2.86	698.4
Batujaya	3.28	1,101.5
Pakisjaya	1.66	612.2

Sumber: Karawang Dalam Angka 2023 (BPS)

Persoalan mobilitas dan persebaran penduduk yang tidak merata masih menjadi problem yang dihadapi diberbagai daerah sebagai tujuan migrasi. Persoalan kepadatan penduduk, migrasi yang tidak teratur dan terarah akan menyebabkan permasalahan sosial bagi daerah-daerah dengan tingkat migrasinya terus meningkat, misalnya terhadap daya saing penduduk lokal yang rendah dengan migran dari berbagai daerah akan menimbulkan kesempatan kerja bagi penduduk lokal terpinggirkan. Justru akan diikuti dampak jumlah penduduk miskin atau pengangguran di daerah tujuan migrasi meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh melalui website *Opendata.jabarprov.go.id* dalam 4 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.10 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Karawang

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per- km²
Pengkalan	1.67	401.98
Tegalwaru	1.60	375.0
Ciampel	1.80	393.43
Telukjambe Timur	5.40	2,956.4
Telukjambe Barat	2.27	809.5
Klari	8.17	2,508.9
Cikampek	4.88	3,290.9
Purwasari	3.34	2,508.9
Tritamulya	2.05	1,106.2
Jatisari	3.29	1,463.1
Banyusari	2.29	1,041.3
Kotabaru	5.64	4,123.5
Cilamaya Wetan	3.26	1,037.01
Cilamaya Kulon	2.69	986.9
Lemahabang	2.69	1,256.9
Telagasari	2.82	1,340.9
Majalaya	3.21	2,102.1
Karawang Timur	6.38	5,044.5
Karawang Barat	6.66	4,200.6
Rawamerta	2.21	1,097.9
Tempuran	2.65	713.6



Sumber: [Opendata.jabarprov.go.id](https://opendata.jabarprov.go.id)

Grafik 2.12 Migrasi penduduk masuk di Kabupaten Karawang

Jumlah migrasi yang terjadi di Kabupaten Karawang pada tahun 2019- 2020 mengalami jumlah penurunan yang signifikan, ini disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap mobilitas penduduk untuk mencegah terjadi penyebaran Pandemic Covid-19, sehingga penurunan jumlah migran yang masuk di Kabupaten Karawang. Pada tahun berikut jumlah tersebut meningkat bahkan melampaui dari jumlah migran pada tahun pra-pandemi hingga pada tahun terakhir pada 2022 yang jumlahnya terus meningkat di Kabupaten Karawang. Jika melihat data BPS (tabel 2.11) terhadap jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar akan memberikan gambaran terhadap total penambahan penduduk dari sisi migrasi yakni sebagai berikut:

Tabel 2.12 Penduduk Pra Sejahtera dan Sejahtera

Tahun	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera
2018	111.825	490.120
2019	110. 827	517.501
2020	112.112	518.561
2021	110.105	521.224

SumberDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karawang

Jumlah penduduk pra Sejahtera jika melihat pada tabel di atas masih terjadi jumlah yang belum stabil, artinya masih terdapat jumlah keluarga yang tinggi terhadap pemenuhannya baik secara ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang masih membutuhkan perhatian. Sebaliknya jumlah Keluarga sejahteraan terus mengalami peningkatan ini menggambarkan bahwa pemerintah dalam hal membantu meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga berdampak positif dan langsung dirasakan berdasarkan data tersebut. Namun pada Pembangunan keluarga perlu juga melihat terhadap tingkat kondisi harmonis dalam suatu keluarga dengan membandingkan dengan tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diambil pada tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.11 Migrasi Masuk-Keluar di Kabupaten Karawang

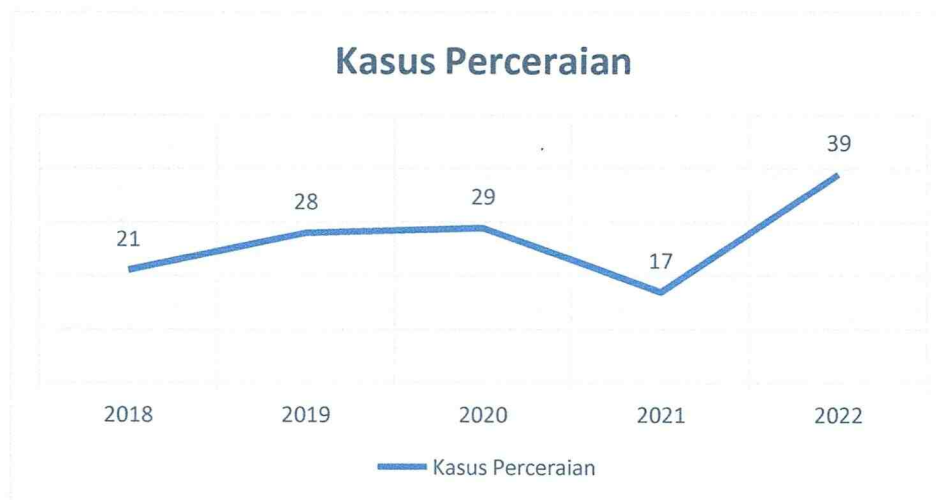
Tahun	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	Migrasi Neto
2010	313.770	177.362	136.408
2020	376.810	175.128	201 682

Sumber: Statistik Data Provinsi Jawa Barat 2010-2020

Jumlah migrasi masuk dengan perhitungan 10 tahunan pada tahun 2010 hingga 2020 mengalami peningkatan, sebaliknya migrasi keluar dari Kabupaten Karawang jumlahnya tidak mencapai setengah dari jumlah migran yang masuk di Kabupaten Karawang. Sehingga menjadi tingkat kepadatan di Kabupaten Karawang menjadi wilayah yang cenderung terbatas apabila terus adanya peningkatan.

4. Pembangunan Keluarga

Kondisi keluarga menggambarkan kemampuan keluarga di Kabupaten Karawang menjadi peran dan fungsi keluarga secara optimal baik secara ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Kondisi ini dapat digambarkan pada pilar Pembangunan Keluarga dengan juga membandingkan dengan beberapa penjabaran sub-bab sebelumnya. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang yang dirilis oleh BPS terkait penduduk pra Sejahtera dalam 4 tahun terakhir sebagai berikut:



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Grafik 2.13 Kasus Perceraian di Kabupaten Karawang

Tingkat perceraian dengan melihat Grafik di atas terjadi pertumbuhan meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup baik, namun sebaliknya pada tahun berikutnya 2022 terjadi lonjakan kasus perceraian dengan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir yang mencapai 39 kasus perceraian. Sehingga perlu juga melihat faktor lain terkait dengan usia penduduk baik secara mental tidak hanya pada ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan.

5. Data dan Informasi Kependudukan

Upaya pembangunan penduduk tidak terlepas dari persoalan data dan informasi yang merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian, karena data tersebut menjadi landasan penyusunan berbagai kebijakan pembangunan daerah yang terarah sesuai dengan kondisi yang riil dan tepat guna. Melihat pengembangan database kependudukan yang ada di Kabupaten Karawang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bentuk pelayanan dalam tertib administrasi penduduk.

komunikasi data pada administrasi kependudukan, dan juga Identitas Kependudukan Digital yang dapat diakses oleh setiap penduduk secara digital tanpa menunjukkan identitas secara fisik dan juga dapat dilakukan kekinian data secara digitalisasi.

Pengembangan database kependudukan berpengaruh terhadap kecepatan terhadap pelayanan pada penduduk untuk mendapatkan akses terkait administrasi kependudukan. Selain itu, menjadi tolak ukur terhadap pengembangan data dan informasi penduduk dapat dilihat melalui beberapa indikator (tabel 2.13) pada 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.13 Data dan Informasi Kependudukan

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Akte Kelahiran (Usia 0-17) (%)	87.82	89.48	92.01	96.18	97.54
Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	-	-	20,7	23	-
Akta Perkawinan (%)	22.69	38.24	-	13.26	53.16
Kasus Perceraian	3307	3998	3873	4041	4286
Akta Kematian (%)	14.04	99.27	46.9	114.6	367.07
Akta Perceraian (%)	33.3	33.3	35.7	82.5	90

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jika melihat indikator di atas terhadap pelayanan data dan informasi kependudukan mengalami peningkatan terhadap pelayanan pada setiap penduduk baik kepemilikan Akte Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Kematian yang memberikan informasi secara berkala terhadap jumlah penduduk dan penurunan pada perubahan yang terjadi. Sehingga menjadi acuan kebijakan daerah terhadap pembangunan di wilayah.

Pengembangan lain yang dilakukan juga dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Penduduk (SIAP) guna memberikan informasi dan

akan diambil, penting untuk menampilkan bagaimana proyeksi berpengaruh terhadap situasi kependudukan.

A. Penyusunan Proyeksi

Penyusunan proyeksi terdapat delapan langkah yang ditempuh, yaitu:

1. Menentukan prioritas masalah-masalah kependudukan berupa jumlah penduduk yang besar, perencanaan Program KB, perencanaan tata ruang dan pemukiman, penguatan ketahanan pangan, penguatan layanan Kesehatan dasar, permasalahan sanitasi dan pengelolaan sampah.
2. Menentukan wilayah geografis yang akan disusun proyeksinya.
3. Menentukan periode proyeksi. Periode proyeksi dimulai pada tahun dasar hingga pada tahun tertentu yang ditetapkan. Tahun dasar umumnya dipilih berdasarkan data lima tahun kebelakang dan disesuaikan dengan kebutuhan proyeksi.
4. Mengumpulkan data. Pengumpulan data sebagai proses proyeksi dan data harus valid (mencerminkan kondisi populasi), reliabel (dikeluarkan dari sumber yang dapat dipercaya), dan teraktual untuk menjadi kualitas hasil proyeksi.

Data kependudukan yang dibutuhkan dalam penyusunan proyeksi antara lain sebagai berikut:

- a) Data dasar penduduk menurut umur dan jenis kelamin periode terakhir;
- b) Data kelahiran total minimal dua periode dan data kelahiran terakhir menurut kelompok umur;

BAB III

PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN

Proyeksi penduduk bertujuan sebagai titik awal bagi sebagian besar proyeksi yang dibutuhkan di masa depan baik kebijakan, penganggaran, strategi percepatan sarana dan prasarana, dan lain-lain. Upaya ini merupakan bagian penting untuk melakukan diskusi sebagai langkah kebijakan yang akan ditempuh. Aspek penting dalam mengeluarkan suatu kebijakan ialah melakukan identifikasi masalah yang secara konkret terjadi dan adanya hasil kajian serta masukan dalam agenda pembuatan kebijakan. Mengingat dalam hal pembangunan, penduduk menjadi subjek dan objek dalam pembangunan itu sendiri, maka menjadi upaya penting dalam mengukur proyeksi secara prediktif penduduk berpengaruh terhadap kemampuan analisis dari kondisi teraktual, analisis dampak yang terjadi maupun pembangunan. Disisi lain, proyeksi pembangunan digunakan untuk memberikan ilustrasi seberapa besar tantangan ke depan. Sehingga, proyeksi juga diperlukan pada proses kebijakan yang membutuhkan perencanaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Penyajian terhadap proyeksi penduduk akan mengarah pada bentuk pelayanan yang dibutuhkan untuk solusi dan perubahan yang diajukan pada indikator berbasis populasi yang akan dicapai. Kebutuhan akan proyeksi penduduk melihat ukuran dan komposisi penduduk di masa depan dilandasi pada dua asumsi. Pertama, proyeksi berdasarkan asumsi sederhana, dengan pertimbangan adanya varian rendah, medium dan tinggi dari tiap asumsi, sehingga dapat ditentukan kisaran proyeksi yang rasional. Kedua, Ketika hasil proyeksi penduduk dimasukkan dalam proyeksi kebijakan yang

- c) Data kematian dan kematian bayi menurut jenis kelamin minimal dua periode;
- d) Data migrasi berdasarkan periode tahunan atau sesuai dengan kebutuhan proyeksi;
- e) Data kependudukan sebagaimana dimaksud bersumber dari data registrasi, sensus, atau survey. Persyaratan penggunaan data registrasi sebagaimana dimaksud dapat digunakan cakupannya paling sedikit 80%.

5. Menetapkan Asumsi.

Proyeksi mensyaratkan adanya perkiraan yang disusun berdasarkan asumsi yang mendasari keadaan di masa mendatang.

- a) Konsultasi dengan para pakar terkait;
- b) Mempelajari referensi atau dokumen-dokumen nasional, khusus dalam menetapkan asumsi target pencapaian proyeksi;
- c) Mempelajari data proyeksi yang dihasilkan oleh instansi/pihak lain;
- d) Mempelajari dokumen atau data proyeksi yang memiliki kemiripan dengan wilayah yang akan dijadikan lokus proyeksi.

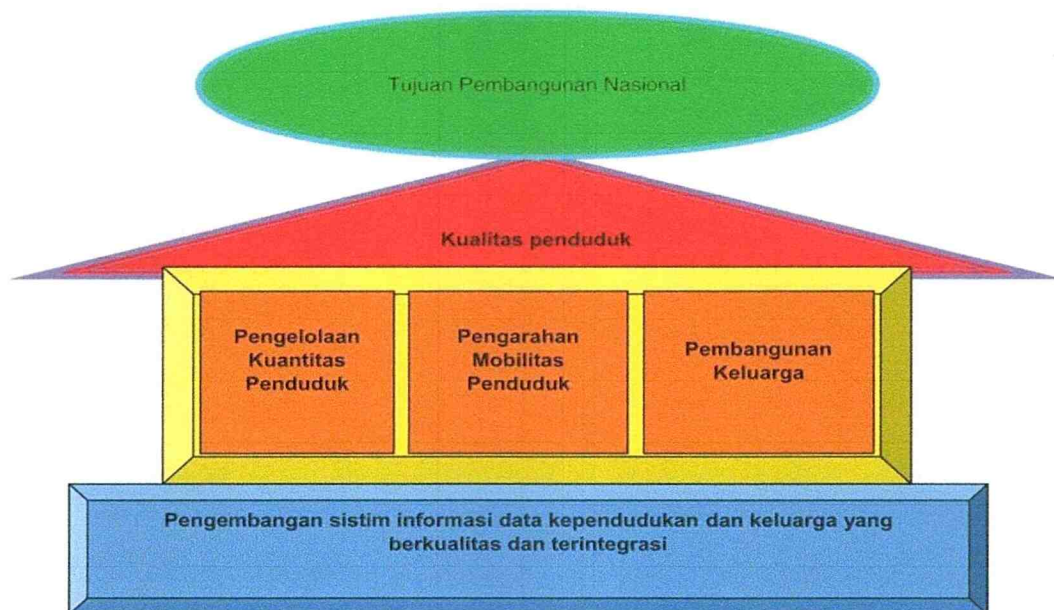
6. Menggunakan Aplikasi yang mendukung terhadap pengumpulan data. Pada saat data tahun dasar dan kebijakan/keputusan yang berkaitan dengan asumsi proyeksi telah ditetapkan, program yang digunakan untuk mengolah data dan membuat proyeksi-proyeksi yang dibutuhkan melalui unduhan pada <https://cis.bkkbn.go.id/dalduk/?p=18> atau aplikasi yang lain untuk mendukung pengolahan data proyeksi penduduk.

7. Metode yang digunakan ialah metode proyeksi trend dengan menggunakan data pada masa lalu dan kemudian diproyeksikan dimasa depan, dan proyeksi target dengan melihat capaian yang ingin dicapai pada tahun dimasa depan.
8. Menganalisis hasil proyeksi dari hasil proyeksi perlu dianalisis dan dibandingkan dari berbagai asumsi untuk menyusun kebijakan yang sesuai.
9. Diseminasi hasil proyeksi. Setelah disusun, hasil proyeksi sebaiknya didiseminasikan kepada pemangku kebijakan. Secara khusus, presentasi proyeksi tersebut dapat mendorong terlaksanakannya dialog kebijakan berkaitan dengan permasalahan strategis.

Tahapan akhir dalam penyusunan proyeksi penduduk adalah menyepakati hasil proyeksi dan analisis proyeksi indikator/parameter kependudukan pada masing-masing pilar tersebut. Kesepakatan tersebut berupa penandatanganan dokumen hasil proyeksi yang melibatkan sektor terkait dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar.

Pada Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), melihat pada Pasal 4 bahwa strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar Pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan. Melihat dasar pemikiran yang terdapat pada buku Pedoman GDPK di Indonesia paling tidak harus melibatkan lima pilar tersebut.

Hubungan Antar Lima Pilar GDPK



Gambar 3.1 Hubungan Antara Lima Pilar GDPK

Penyusunan GDPK Kabupaten Karawang, maka Pemerintah Daerah turut memperhatikan arah kebijakan dan startegi Pembangunan kependudukan nasional dan provinsi serta program pencapaian SDGs. Dengan keterpautan dan sikroninasi ini diharapkan GDPK 5 pilar Kabupaten Karawang akan menjadi rujukan pembangunan kependudukan dalam aspek-aspek pembangunan daerah.

B. Kondisi Kependudukan Kabupaten Karawang Teraktual dan Proyeksi 2025-2045

1. Kuantitas Penduduk

a. Fertilitas Penduduk

Pilar pertama terkait kuantitas terhadap fertilitas penduduk berdasarkan data yang diambil pada lima tahun terakhir dan juga dilakukan proyeksi kedepan pada tahun 2045 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Proyeksi Fertilitas Penduduk

Indikator GDPK	Sumber	Data Historis					Targer Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)	BPS	2,336,009	#####	2,361,019	2,468,950	2,505,247	2,581,245	2,703,128	2,805,594	2,886,609	2,946,025
Laju Pertumbuhan Penduduk	BPS	0.84	0.77	1.60	0.60	1.49	0.67	0.93	0.75	0.57	0.39
Tingkat Kesuburan Umum / Total Fertility Rate (TFR)	DPPKB	2.23	2.25	2.22	2.22	2.22	2.21	2.18	2.16	2.14	2.12
Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur/Age Specific Fertility Rate (ASFR)	DPPKB	445.8	449.9	444.8	444.4	444.0	441.2	436.7	432.2	427.7	423.2
Cakupan Peserta KB Aktif	DPPKB	315	319	322	321	323	329	338	347	356	365
Persentase perkawinan usia anak	DP3A/Ke menag	66.7	66.7	91.0	46.0	63.0	52.0	38.0	30.0	25.0	20.0

Sumber: Data BPS Karawang 2023 diproyeksikan 2023

Mengacu pada Standar Bapenas maka LPP tumbuh rata-rata 0,67% sampai tahun 2045, LPP Nasional berdasarkan metode trend dari 2020-2025 tumbuh sebesar 1,08, tahun 2035-2040 kenaikan mencapai 0,57%. Berdasarkan acuan di atas maka perhitungan LPP Karawang menggunakan metode trend dengan pertumbuhan LPP dari tahun 2025-2030 tumbuh sebesar 0,93%, dari tahun 2030-2035 tumbuh sebesar 0,75%, dari tahun 3035-2040 tumbuh sebesar 0,57%, dan dari tahun 2040- 2045 tumbuh sebesar 0,39%. TFR menggunakan metode trend. Hasil perhitungan

sudah sesuai dengan target nasional di ahir tahun 2045 sebesar 2,12%. Peserta KB pemula atau baru memulai lagi setelah melahirkan tidak ditemukan target nasional, untuk perhitungan partisipasi KB aktif Karawang menggunakan metode trend, dan target capaian pada 2045 sebanyak 365 orang per tahun. Tingkat persentase perkawinan usia anak ditargetkan menurun 5 % setiap tahun, sehingga pada tahun 2045 ditargetkan hanya ada kisaran 21,57 persen.

Tabel 3.2 Proyeksi Bangga Kencana

Bangga Kencana	Sumber	Data Historis					Targer Capaian					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	2030	2035	2040	2045
1) mCPR (Pengguna Alat Kontrasepsi Modern = %)	DDPKB	72.02	73.48	71.81	72.07	70.02	70.257	71	72	73	74	75
2) MKJP (Alat Kontrasepsi jangka panjang)	DDPKB	49,527.0	55,812.0	41,013.0	61,774.0	52,031.5	55,322.8	57,517.0	63,002.5	68,488.0	73,973.5	79,459.0
a. IUD (orang)	DDPKB	18,055.0	20,003.0	21,476.0	23,304.0	20,808.0	23,371.3	25,132.7	29,536.2	33,939.7	38,343.2	42,746.7
b. MOW (orang)	DDPKB	9,251.0	9,685.0	9,970.0	10,782.0	10,112.0	10,805.7	11,369.5	12,779.0	14,188.5	15,598.0	17,007.5
c. MOP (orang)	DDPKB	2,669.0	2,549.0	2,444.0	2,370.0	1,615.0	1,643.3	1,847.4	2,152.9	2,481.5	2,833.2	3,208.1
d. Implant (orang)	DDPKB	19,602.0	23,575.0	26,453.0	28,619.0	24,000.0	28,601.8	31,369.8	38,289.8	45,209.8	52,129.8	59,049.8
3) Unmet Need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	DDPKB	12.4	10.7	12.4	12.4	14.1	13.9	14.9	17.4	19.9	22.4	24.9

Sumber: Data DPPKB Karawang 2023 diproyeksikan 2023

b. Mortalitas Penduduk

Angka kematian dijadikan sebagai indikator atau indeks menentukan tingkatan kematian pada suatu penduduk, variable yang menjadi tolak ukur yang digunakan terhadap angka kematian bayi, kematian balita, dan kematia ibu, Hasil proyeksi yang dilakukan dengan berdasarkan data lima tahun terakhir (tabel 3.3) sebagai perhitungan menentukan pada tahun selanjutnya, sebagai berikut:

Tabel 3.3 Proyeksi Mortalitas Penduduk

Indikator GDPK	Sumber	Data Historis					Targer Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate - IMR)	Dinkes	162	157	136	160	178	160	150	140	130	120
Angka Kematian Balita (Childhood Mortality Rate)	Dinkes	9	4	8	11	4	5	4	3	2	2
Angka kematian Ibu (Maternal Mortality Rate)	Dinkes	43	45	60	117	52	55	50	45	40	35

Sumber: Data Dinas Kesehatan Karawang 2023 diproyeksikan 2023

Asumsi dalam perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk berdasarkan data yang tersedia adalah menentukan proyeksi berdasarkan tiga komponen yaitu asumsi kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas). Estimasi perhitungan menurut asumsi sebagai berikut:

1) Asumsi perhitungan proyeksi penduduk adalah:

$$P_t = P_0(1 + rt) \text{ dengan } r = \frac{1}{t} \left(\frac{P_t}{P_0} - 1 \right)$$

dimana:

P_t = jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = jumlah penduduk pada tahun dasar

r = laju pertumbuhan penduduk

t = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

2) TFR diasumsikan turun mengikuti kecenderungan data di masa lalu, namun tidak akan menurun terus, Batasan terhadap TFR adalah 1,6;

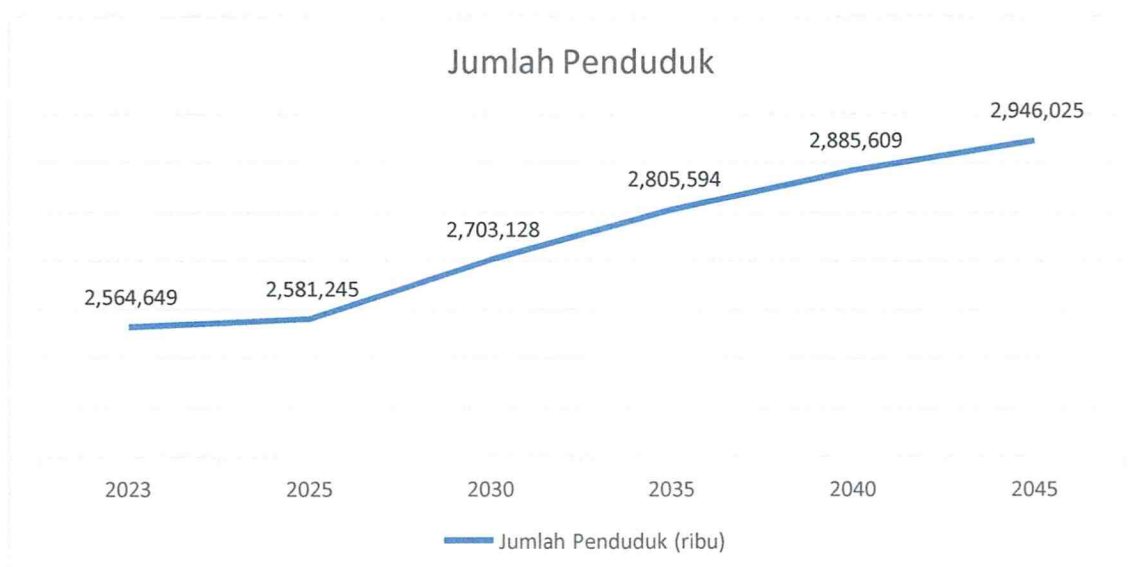
3) Batas bawah 1,6 digunakan sebagai asumsi bahwa TFR Indonesia akan turun namun tidak akan lebih rendah dari pada rata-rata di negara maju;

Hasil Proyeksi

Kuantitas penduduk digunakan perhitungan dari selisih antara jumlah penduduk yang lahir dan mati. Agar kuantitas penduduk terkendali sesuai dengan capaian baik merujuk secara nasional yang diinginkan dicapai maka diperlukan perhitungan proyeksi penduduk berdasarkan asumsi pertumbuhan penduduk, kelahiran dan

kematian sebagai faktor penentu pertumbuhan disuatu wilayah dengan kecenderungan data di masa lalu hingga terkini. Estimasi atau perkiraan bertambahnya jumlah pertumbuhan penduduk, kelahiran dan kematian termasuk angka kelahiran total (TFR), angka kelahiran menurut Umur tertentu (ASFR), dan angka kematian bayi (IMR).

Laju jumlah pertumbuhan penduduk sebagaimana tren dari tahun lalu akan mengalami kenaikan secara berjenjang yang akan diestimasi perlima tahunan hingga pada tahun 2045. Sebagaimana pada grafik 3.1 sebagai berikut:



Sumber: Data BPS Karawang 2023 diproyeksikan 2023

Grafik 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Penduduk Total, Kab. Karawang 2025-2045

Jumlah Pertumbuhan penduduk diperkirakan akan terus naik selama periode proyeksi dari tahun 2022 sebanyak 2,505,247 orang hingga 2045 mencapai 2,924,204 orang. Pertumbuhan tersebut juga melihat Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang cenderung menurun, sehingga akan berdampak pada jumlah bertambahnya penduduk yang terkendali. Disisi lain juga angka kelahiran yang terus ditekan hingga sesuai dengan target yang ingin dicapai juga mempengaruhi

terhadap jumlah penduduk hingga pada tahun 2045. Estimasi proyeksi angka kelahiran (TFR) hingga 2045 sebagai berikut:



Sumber: Data DPPKB Karawang 2023 diproyeksikan 2023

Grafik 3.2 Proyeksi Tingkat Kesuburan Umum 2025-2045

Penurunan sebagai estimasi proyeksi terhadap angka kelahiran (TFR) terus menurun melihat estimasi proyeksi pada 2045 menjadi 2.12 yang pada tahun sebelumnya sebesar 2.22 (2022). Sehingga dapat diasumsikan bahwa rata-rata jumlah anak yang akan dimiliki seorang Perempuan di Kabupaten Karawang pada masa reproduksinya akan memiliki maksimal 2 anak per Perempuan (2045).

2. Kualitas Penduduk

a. Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan

Capaian kinerja terhadap indikator Program Peningkatan Kesehatan Keluarga yaitu angka kematian Bayi dan angka kematian Ibu sampai pada tahun 2022 belum mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan hasil estimasi proyeksi data sebagai berikut:

Tabel 3.4 Proyeksi Kualitas Kependudukan Bidang Kesehatan

Indikator GDPK	Sumber	Data Historis					Targer Capaian					
		2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2045	
Angka Harapan Hidup	Dinkes	71.81	71.98	72.15	72.33	72.62	73.60	75.28	76.98	78.73	80.52	
Angka Kematian Bayi	Dinkes	162	157	136	160	178	160	150	140	130	120	
Angka Kematian Balita	Dinkes	9	4	8	11	4	5	4	3	2	2	
Angka Kematian Ibu	Dinkes	43	45	60	117	52	55	50	45	40	35	
Prevalensi Balita Gizi Buruk	Dinkes	2.5	3.04	2.08	2.07	2.42	1.86	1.30	1.00	1.00	1.00	
Prevalensi Stunting	Dinkes	17.3	17.3	17.3	20.6	14	13.5	10.5	8.5	6.5	5	
Persentase Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Riskesdas, SSGB, SSGI	54%	59%	57%	57%	57%	60%	63%	65%	68%	70%	

Sumber: Data BPS Karawang 2023 diproyeksikan 2023

Estimasi proyeksi data yang dilakukan menunjukkan bahwa angka harapanhidup yang merupakan indikator dari lama usia seorang untuk hidup sejak lahir terus meningkat, ini sejalan dengan tujuan capaian nasional untuk terus meningkatkan harapan hidup masyarakat, pada Target Nasional Bappenas tahun 2045 melalui skenario optimis sebesar 80 tahun. Proyeksi Angka Harapan Hidup diKarawang menggunakan metode trend dan target capaian tahun. Lain hal jika melihat Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Berdasarkan capaian target Nasional untuk Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2030 di bawah 70 kasus, dalam hal ini pada tahun 2022 angka kasus kematian Ibu mencapai 117 kasus, ini merupakan angka kematian kasus terbanyak di Jawa Barat. Meskipun pada tahun 2022 sudah mengalami penurunan signifikan sesuai dengan penurunan nasional terhadap kematian Ibu, pada tahun 2045 angka yang dicapai terhadap AKI sebesar 16 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) jika disesuaikan dengan *Sustainable Development Governors (SDGs)* pada tahun 2030 sebesar 12 kasus per 1.000 kelahiran hidup. Oleh karena itu

harapan pada tahun 2045 baik AKI dan AKB dapat ditekan hingga pada tahun 2045. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2045 juga diharapkan sudah tidak ditemukan lagi jumlah prevalensi *stunting*.

b. Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan

Kondisi yang diharapkan pada kualitas bidang Pendidikan di Kabupaten Karawang pada tahun 2025-2045 dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing baik secara nasional maupun internasional. Selain itu harus diciptakan sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang terus membaik, agar kerangka capaian yang diinginkan terhadap Indonesia Emas pada tahun 2045 dapat tercapai. Berdasarkan hasil estimasi proyeksi yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Proyeksi Kualitas Bidang Kependidikan

Indikator GDPK	Sumber	Data Historis					Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Rata-rata Lama Sekolah	Disdikpora	7.35	7.65	7.77	7.78	8.04	8.47	9.22	9.98	10.738	12
Harapan Lama Sekolah	RPJMD Karawang 2021	12.07	12.08	12.09	12.1	12.19	12.4	12.7	13.1	13.5	14.81
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Disdikpora	107.7	105.9	104.0	104.0	103.6	100.1	100.0	100.0	100.0	100.0
APK SMP/MTs	Disdikpora	86.3	87.9	88.0	88.0	89.5	91.2	94.4	97.7	100	100
APK SMA/MA/SMK	Disdikpora	76.4	81.6	81.7	81.7	80.0	83.9	87.5	91.2	94.8	98.5

Sumber: Data Disdikpora Karawang 2023 diproyeksikan 2023

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menepuh jenjang ke semua jenjang pendidikan, sedangkan untuk harapan lama sekolah, lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa datang. Upaya capaian yang diinginkan terhadap rata-rata lama sekolah padatahun 2025 sebesar 9.45 dan capaian terhadap harpaan lama sekolah mencapai

13.37. Mengingat capaian nasional pada tahun 2022 seharusnya pada 8.69 tahun. dalam hal ini, jika melihat data lima tahun kebelakang di Kabupaten Karawang terus meningkat, namun belum sesuai dengan capaian nasional, pada tahun 2022. Sedangkan untuk harapan lama sekolah pada tahun 2022 menurut data nasional pada 13.10,⁷ dan pada tahun 2025 diharapkan mencapai 13.37, ⁸ hal ini masih jauh dari jika melihat angka baik rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Karawang.

c. Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi

Kualitas penduduk di bidang Ekonomi dengan tujuan untuk mensejahterakan penduduk dengan ditandai pendapatan masuk perkapita, rasio ketergantungan, tingkat pengangguran, dan berkurangnya tingkat kemiskinan, serta semakin terbukanya kesempatan kerja yang ditandai dengan tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk di Kabupaten Karawang. Indikator yang digunakan sebagai gambaran tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Dalam hal ini acuannya semakin tinggi pendapatan perkapitanya yang diterima maka akan menunjukkan tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Berdasarkan estimasi proyeksi sebagai berikut:

⁷ <https://www.bps.go.id/indicator/26/417/1/-metode-baru-harapan-lama-sekolah.html>, diakses 12 November 2023

⁸ <https://mediaindonesia.com/humaniora/622206/perlu-direvisi-target-rpjp-2025-2045-pendidikan-tidak-realistis>, diakses 12 November 2023.

Tabel 3.6 Proyeksi Kualitas Bidang Ekonomi

Indikator GDPK	Sumber	Data Historis					Targer Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2045
PDRB Per Kapita (juta)	BPS	67.34	69.65	64.85	67.63	70.84	70.55	73.04	75.53	78.02	80.51
Rasio Ketergantungan	BPS	44.72	44.61	44.55	41.00	40.95	41.95	44.76	46.46	47.79	48.72
Tingkat Pengeluaran Perkapita	BPS	11,227	11,856	11,315	11,522	11,927	12,102	12,635	13,168	13,701	14,234
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	BPS	9,05	9.61	11.52	11.83	9.87	5.60	3.80	3.80	3.80	3.80
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	RPJMD Karawang 2021	64.77	63.62	64.9	64.19	64.77	66.75	69.9	75.55	74.63	76.08
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	BPS	187.96	173.66	195.41	210.78	199.91	156.21	99.31	62.57	39.07	24.18
Persentase Penduduk Miskin	BPS	8.06	7.39	8.26	8.95	8.44	6.05	3.67	2.23	1.35	0.82

Sumber: Data BPS Karawang 2023 diproyeksikan 2023

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari pendapatan Domestik Bruto Regional per-kapita (PDRB), ini untuk mengukur kemampuan suatu wilayah terhadap perekonomian pada setiap wilayah. PRDB per-kapita kabupaten Karawang mengalami peningkatan secara tahunan, ini artinya adanya pertumbuhan secara ekonomi terhadap masyarakat dan kesejahteraan. Namun terhadap Rasio ketergantungan sebagai rujukan terhadap usia yang belum produktif dan usia tidak produktif menjadi perhatian sebagai daya tumpu terhadap beban perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Secara nasional untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia emas rasio ketergantungan harus beradapada angka yang seimbang dengan seiring dengan usia produktif disbanding usia

yang belum produktif dan tidak lagi produktif, upaya tersebut pada tahun berjalan harus terjadi peningkatan yang seimbang di tahun-tahun berikutnya, pada tahun 2022 Badan Pusat Statistik tercatat rasio ketergantungan pada angka 40.95, mengingat tujuan capaian di tahun 2050 menurut perhitungan proyeksi BPS rasio ini sudah mencapai angka 54.13. jika tidak adanya keseimbangan terhadap rasio ketergantungan tersebut, maka dapat menjadi beban pemerintah daerah terhadap semakin tingginya tingkat pengangguran di wilayah tersebut, serta dapat terjadi peningkatan kemiskinan yang tinggi. Pada tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karawang berdasarkan data di atas masih belum stabil, meskipun pada beberapa tahun terjadi peningkatan yang disebabkan karena adanya Pandemic Covid-19, namun ditahun selanjutnya sudah mengalami penurunan walaupun belum dapat lebih rendah pada saat kondisi sebelum Pandemi Covid-19. Hal ini seharusnya menjadi penekanan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karawang mengingat banyak sektor industri yang letaknya di Kabupaten Karawang, sentral industri di Indonesia yang ada di Kabupaten Karawang menjadi peluang terhadap masyarakat setempat untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih tinggi. Disamping itu untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka juga harus meningkatkan kualitas sumber daya dimasyarakat agar sesuai dengan kebutuhan di sektor industri. Sehingga juga akan berdampak pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan *roadmap* SDGs terhadap pengangguran terbuka pada 2030 sebesar 3.8%, dan pada tahun 2045 tingkat pengangguran diproyeksikan sekitar 3-4 persen. Jika mengacu pada tingkat nasional pada tahun 2022 sebesar 5.86%. Kemiskinan 4.33% SDGs (2030).

3. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Persebaran penduduk dan mobilitas agar terciptanya persebaran yang merata dan seimbang. Dalam hal ini persebaran dapat meliputi 2 hal, yaitu secara geografis dan administrasi penduduk, acuan yang digunakan dari persebaran penduduk yang dimaksud hanya pada administrasi penduduk. Persebaran Penduduk di Kabupaten Karawang saat ini terkonsentrasi di Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Kotabaru, dan Kecamatan Telukjambe Timur. Masing-masing proporsi setiap kecamatan ialah di Kecamatan Klari (8.17%), Kecamatan Karawang Barat (6.66%), Kecamatan Karawang Timur (6.38%), Kecamatan Kotabaru (5.64%), dan Kecamatan Telukjambe Timur (5.64%). Indikator yang digunakan berdasarkan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Berdasarkan jumlah penduduk per-kecamatan bila melihat laju pertumbuhan penduduk (Tabel 3.7) sebagai berikut:

Tabel 3.7 Proyeksi Persebaran Penduduk Per-Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Pengkalan	38.6	38.2	38.4	41.2	41.9	43.2	45.2	46.9	48.3	49.2
Tegalwaru	37.4	37.1	37.6	39.4	40	41.2	43.2	44.8	46.1	47.0
Ciampel	43.2	42.9	44.1	44.5	45.1	46.5	48.7	50.5	52.0	53.0
Telukjambe Timur	138.9	133.2	135.9	134.4	135.3	139.4	146.0	151.5	155.9	158.9
Telukjambe Barat	53.5	54.6	54.9	56.1	56.8	58.5	61.3	63.6	65.4	66.7
Klari	170.5	176.6	181.1	200	204.7	210.9	220.9	229.2	235.8	240.4
Cikampek	117.4	113.9	115.3	120.7	122.2	125.9	131.9	136.9	140.8	143.5
Purwasari	69.4	73.3	75.9	81.4	83.7	86.2	90.3	93.7	96.4	98.3
Tritamulya	48.6	49.4	49.6	50.6	51.2	52.8	55.2	57.3	59.0	60.1
Jatisari	79	78.3	78.5	81.4	82.4	84.9	88.9	92.3	94.9	96.8
Banyusari	56	55.8	55.4	56.7	57.3	59.0	61.8	64.2	66.0	67.3
Kotabaru	131.4	128.1	131.1	139.2	141.2	145.5	152.4	158.1	162.7	165.8

Cilamaya Wetan	82.6	77.6	78.2	80.9	81.5	84.0	87.9	91.3	93.9	95.7
Cilamaya Kulon	65.6	63.8	64.5	66.6	67.4	69.4	72.7	75.5	77.6	79.2
Lemahabang	66.7	64.6	64.7	66.8	67.4	69.4	72.7	75.5	77.6	79.2
Telagasari	66	67.9	68.1	69.7	70.7	72.8	76.3	79.2	81.4	83.0
Majalaya	48.3	61.9	64.5	76.5	80.4	82.8	86.8	90.0	92.6	94.4
Karawang Timur	129.5	143.1	146.3	155.7	159.7	164.5	172.3	178.8	184.0	187.6
Karawang Barat	170.6	160.5	161.5	165.7	166.8	171.9	180.0	186.8	192.2	195.9
Rawamerta	53.4	54.1	53.6	54.7	55.3	57.0	59.7	61.9	63.7	64.9
Tempuran	64.3	64.9	64.9	65.7	66.4	68.4	71.6	74.4	76.5	78.0
Kutawaluya	58.9	58	59	61.3	62.1	64.0	67.0	69.5	71.5	72.9
Rengasdengklok	114.7	108	109.7	117.2	118.6	122.2	128.0	132.8	136.6	139.3
Jayakarta	65.7	63.4	65.5	68	68.9	71.0	74.3	77.2	79.4	80.9
Pedes	77	76.3	78.1	79.8	80.8	83.3	87.2	90.5	93.1	94.9
Cilebar	43.2	43.5	43.4	45.4	46.1	47.5	49.7	51.6	53.1	54.1
Cibuaya	53.4	51	52	53.8	54.4	56.1	58.7	60.9	62.7	63.9
Tirtajaya	67.9	68.1	70.1	70.8	71.7	73.9	77.4	80.3	82.6	84.2
Batujaya	82.7	76.6	77.9	81.5	82.2	84.7	88.7	92.1	94.7	96.5
Pakisjaya	40.1	39	39.8	41.1	41.6	42.9	44.9	46.6	47.9	48.9

Sumber: Data BPS Karawang 2023 diproyeksikan 2023

Jumlah penduduk yang diperkirakan semakin bertambah dengan pola di salah satu Kecamatan akan memperberat tata kelola, penyediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya lahan yang kian terkikis sempit. Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Karawang dipengaruhi juga terhadap migrasi penduduk ke Kabupaten Karawang yang tidak dapat diprediksi dan sulit dilakukan pendataan. Ini disebabkan Kabupaten Karawang menjadi wilayah Industri terbesar di Indonesia, hal tersebut yang menjadi banyaknya migrasi masuk, berdasarkan data lima tahun terakhir dan estimasi proyeksi yang dilakukan terhadap migrasi masuk sebagai berikut:

Tabel 3.8 Proyeksi Migrasi Masuk

Indikator GDPK	Sumber	Data Historis					Targer Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Migrasi Masuk	Statistika Migrasi Jabar	14,019	14,383	9,059	15,321	17,312	17,781	21,543	25,306	29,068	32,830

Sumber: Data BPS Karawang 2023 diproyeksikan 2023

Migrasi menggambarkan aktivitas perpindahan penduduk dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Sehingga dalam hal ini sangat penting untuk mengatur dan mengelola terkait adanya migrasi. Menurut data BPS SUPAS pada tahun 2010 penduduk cenderung berpindah pada wilayah yang mempunyai pontensi di perkotaan, bahwa diproyeksikan tahun 2045 hampir penduduk Jawa tinggal di perkotaan.⁹

4. Pembangunan Keluarga

Pembangunan Keluarga sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Pembangunan keluarga harus melihat berbagai aspek baik itu berupa ekomoni, pendidikan, maupun kesehatan. Jika melihat aspek tersebut terhadap pembangunan keluarga di Kabupaten Karawang terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam perhitungan estimasi proyeksi yang dilakukan, sebagai berikut:

Tabel 3.9 Proyeksi Pembangunan Keluarga

Indikator GDPK	Sumber	Data Historis					Targer Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	BPS	111,825	110,827	112,112	110,105	111,217	110,249	109,280	108,311	107,342	106,374
Kasus perceraian	Disdukcapil dan Menag	3,307	3,998	3,873	4,041	4,286	4,902	5,902	6,903	7,903	8,904

Sumber: Data BPS Karawang 2023 diproyeksikan 2023

Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat pembangunan keluarga terhadap Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, hal ini dengan melihat setiap keluarga yang belum

⁹ Bappenas, "Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur, Kementerian PPN, Jakarta: 2019. hlm 6.

dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan data pada lima tahun terakhir terhadap Jumlah Keluarga Pra Sejahtera masih fluktuatif, artinya capaian yang diinginkan ialah adanya penurunan terhadap Jumlah Keluarga Pra Sejahtera sehingga berdampak pada kualitas keluarga yang ideal. Hal ini juga tidak terlepas dari jumlah kasus perceraian yang dijadikan sebagai lemahnya kualitas dalam keluarga yang berdampak tidak terciptanya keluarga yang seutuhnya.

5. Data dan Informasi Data Kependudukan

Faktor penting lainnya terhadap persebaran penduduk secara administrasi ialah data dan informasi kependudukan, sebab pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil). Dokumen Kependudukan merupakan dokumen yang sangat penting bagi masyarakat yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen Kependudukan merupakan hak dan identitas setiap orang yang digunakan untuk berbagai macam urusan. Berdasarkan proyeksi dari data dasar lima tahun kebelakang (tabel 3.10) hingga tahun 2045 sebagai berikut:

Tabel 3.10 Proyeksi Data dan Informasi Kependudukan

Indikator GDPK	Sumber	Data Historis									
		2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Persentase anak (Usia 0-17 tahun) memiliki akte kelahiran	Disdukcapil	87.82	89.48	92.01	96.18	97.54	105.68	118.75	131.82	144.89	157.96
Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Disdukcapil	-		20.7%	23.0%	23.0%	25.1%	30.0%	40.0%	50.0%	75.0%
Persentase kepemilikan akta perkawinan	Disdukcapil	22.69	38.24	25.75	13.26	53.16	48.6	66.58	84.56	90.2	91.1
Persentase kepemilikan akta perceraian	Disdukcapil	33.33	33.33	35.7	82.555	90	93	94	95	96	97
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	Disdukcapil	14.04	99.27	46.9	86.5	90.5	93	94	95	96	97

Sumber: Data Disdukcapil Karawang 2023, diproyeksikan 2023

Kondisi capaian yang diharapkan terhadap data dan informasi penduduk pada 2022-2045 penyediaan data yang saat ini sudah beralih pada digitalisasi, penggunaan data di era big data menjadi kebutuhan. data dijadikan sebagai informasi dalam pertimbangan penyusunan kebijakan, baik dari persebaran penduduk, jumlah anak terhadap identitas anak di bawah umur, bukti kepemilikan akta seseorang ataupun akta kematian.

BAB IV

VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

A. Visi dan Misi GDPK

Berdasarkan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang “Karawang Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan” dan Visi Indonesia 2045 (Bappenas) adalah berdaulat, maju, adil, dan makmur. Visi tersebut demi mewujudkan tingkat kualitas manusia yang lebih tinggi, menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia, pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan. Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka misi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai berikut:

-
1. Membangun sumber daya manusia yang unggul (Transformasi Pembangunan SDM)
 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata (Transformasi Pembangunan Ekonomi)
 3. Mendorong pembangunan infrastruktur yang andal dan terintegrasi (Transformasi Kewilayahan)
 4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, birokrasi yang ber-AKHLAK, dan layanan publik yang inovatif (Transformasi Tata Kelola)
 5. Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, hijau dan berkelanjutan (Landasan Transformasi).

B. Isu Strategis

Isu strategis yang menjadi pokok dari Grand Design Pembangunan Kependudukan berdasarkan 5 pilar yang berkaitan dengan kependudukan dan acuan capaian yang menjadi terintegrasi dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2045. Poin-poin penting yang menjadi prioritas karena memiliki pengaruh untuk sasaran pembangunan, cakupan dampak yang dapat ditimbulkan, serta potensi perkembangan dan pengelolaan persoalan tersebut bagi Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait. Berdasarkan penjelasan tersebut maka akan disusun berdasarkan lima pilar GDPK, meskipun pada penyusunan terkesan saling tumpang tindih karena antar pilar saling berkaitan.

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Isu strategis untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan menekan angka kelahiran (TFR) dan *replacement level*. Jumlah kelahiran yang dapat menggantikan generasi sebelumnya bertujuan untuk terjaganya pertumbuhan penduduk tetap stabil. Angka Kelahiran Kabupaten Karawang masih berada pada kisaran 2.23-2.22, sehingga pertumbuhan penduduk masih tinggi di atas angka nasional kisaran 2.1-2.0. Pertumbuhan angka kelahiran dipengaruhi beberapa untuk menekan jumlah penduduk yang lahir, upaya yang dilakukan melalui program keluarga berencana merupakan kebijakan untuk mengatur dan mengelola terhadap perencanaan kehamilan bagi keluarga, jarak antara kelahiran anak pertama dengan anak selanjutnya, sehingga upaya tersebut dapat menekan angka kelahiran terhadap keluarga dalam membentuk keluarga ideal.

Perubahan nilai tentang anak dari ekonomi ke non-ekonomi semakin menguat di masyarakat, sehingga menjadi penjabar bahwa anak tidak lagi dimaknai sebagai faktor penyumbang ekonomi keluarga. Namun anak lebih dari itu yang merupakan individu memiliki hak hidupnya sendiri. Mortalitas menjadi faktor penting untuk mengatur tingkat keseimbangan jumlah penduduk pertumbuhan penduduk, hal ini juga mempengaruhi terhadap tingkat angka harapan hidup seseorang. Meskipun disisi lain akan mempengaruhi rasio ketergantungan di wilayah tersebut.

2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Isu peningkatan kualitas penduduk terdapat tiga aspek sebagai fungsi untuk meningkatkan kualitas penduduk, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ketiga aspek tersebut bekerja secara bersama-sama bertujuan menghasilkan masyarakat yang berkualitas dari segi kesehatan, pendidikan dan mandiri secara ekonomi.

a. Stunting

Prevalensi stunting yang masih ditemukan pada kasus kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi. Disamping itu faktor berkepanjangan terhadap penyakit yang akan berdampak munculnya penambahan kasus stunting. Sebagaimana dipaparkan dalam sub-bab sebelumnya, bahwa stunting berdampak signifikan terhadap penurunan kualitas hidup penduduk, misalnya kemiskinan yang terus bertambah, kurang sehat dan rentan terhadap penyakit, serta menurunnya kemampuan kognitif.

b. Penyakit menular dan non-menular

Faktor yang juga mempengaruhi kualitas hidup pada bidang kesehatan ialah penyakit menular, dalam hal ini penyakit menular di Kabupaten Karawang meliputi Tuberculosis (TB), Diare dan HIV/AIDS. Penyebaran penyakit menular di Kabupaten Karawang berupa HIV/AIDS pada tahun 2022 jumlahnya 38.418 jiwa, untuk penyakit Diare jumlahnya 11.902 jiwa dan TB jumlahnya 3.743 jiwa.¹⁰ Hal ini menjadi perhatian terhadap upaya peningkatan terhadap kualitas kesehatan penduduk. Sedangkan penyakit tidak menular terjadi peningkatan jumlah penderitanya antara lain penyakit hipertensi, obesitas. Penyakit menular dan tidak menular menjadi beban untuk peningkatan kualitas penduduk karena akan berdampak pada jumlah mortalitas, umur harapan hidup dan kemiskinan baru.

c. Angka kemiskinan

Trend angka kemiskinan Kabupaten Karawang realtif belum stabil, meskipun angkanya masih dibawah target nasional 8.5-9 persen. Jumlah penduduk miskin terhadap jumlah total penduduk berada pada kisaran \pm 8 persen. Diharapkan angka kemiskinan dapat menurun hingga kurang dari 7 persen di 2045. Kemiskinan akan menghalangi penduduk untuk meraih derajat hidup yang berkualitas, hal ini akan berpengaruh terhadap keterbatasan pilihan dan akses ke layanan sosial, kesehatan dan Pendidikan. Angka kemiskinan berpengaruh pada masih tingginya tingkat pengangguran serta kurang optimalnya tingkat partisipasi angkat kerja

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, *Kabupaten Karawang Dalam Angka 2023*.

yang ada, hal ini akan menunjukkan pada usia produktif pada perputaran bidang barang dan jasa.

d. Rata-rata lama sekolah

Isu strategis di bidang pendidikan menjadi perhatian penting mengingat upaya peningkatan kualitas pada pengembangan profesional pendidik dan tenaga pendidik menjadi faktor kunci dalam pemerataan dan meningkatkan mutu pendidikan yang berdampak pada peserta didik. Hal ini perlu menjadi perhatian sebab tenaga pendidik berpengaruh terhadap pola mendidik dan mengajar di suatu pendidikan. Perluasan akses terhadap pendidikan dapat memberikan peningkatan pada harapan sekolah baik dari jenjang pendidikan dasar hingga pada jenjang perguruan tinggi.

3. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

a. Ketimpangan antar wilayah

Permasalahan dan tantangan yang ada dalam pengarahannya mobilitas di Kabupaten Karawang masih adanya ketimpangan antar wilayah kecamatan hingga desa. Faktor tingkat kemiskinan di setiap desa serta pertumbuhan ekonomi yang rendah di wilayah pedesaan. Daerah yang menjadi pusat perputaran ekonomi menjadi daya tarik bagi penduduk untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi, sehingga kepadatan di daerah pusat ekonomi cukup tinggi. Mobilitas jarak dekat terjadi antara tempat tinggal ke tempat kerja, pusat perbelanjaan, sekolah, wisata, kesehatan, dan layanan sosial ekonomi lainnya.

b. Migrasi penduduk

Penduduk yang berpindah, terutama yang berasal dari luar Kabupaten Karawang, seringkali tidak mengubah kartu identitasnya. Mereka masih tercatat sebagai penduduk di wilayah asalnya. Sementara, di daerah asal sudah dianggap pindah (meski masih tercatat sebagai penduduk setempat). Akibatnya pelaku migran akan dikeluarkan dari daftar penerima jaminan sosial di daerah asalnya karena secara de facto tidak tinggal di daerah asal.

Di daerah tujuan, migran juga akan dikeluarkan dari daftar penerima jaminan sosial karena secara de jure bukan penduduk Kabupaten Karawang.

Kondisi ini yang kemudian mengakibatkan hilangnya akses mereka untuk mendapatkan jaminan sosial ketika mengakses berbagai layanan dasar. Disamping itu, jumlah migrasi yang masuk mengakibatkan adanya persaingan antar penduduk untuk mendapat pekerjaan, sehingga ini berdampak pada tingkat pengangguran. Munculnya perkembangan tempat hunian yang begitu pesat akibat jumlah migrasi yang masuk bisa memunculkan daya tampung lingkungan yang terbatas serta tidak sesuai dengan tata ruang wilayah daerah.

4. Pembangunan Keluarga

Persoalan pembangunan keluarga di Kabupaten Karawang pada upaya pencegahan perkawinan usia anak. Pernikahan di usia anak memunculkan resiko persoalan jangka Panjang antara lain kekerasan dalam rumah tangga, sebab kondisi psikologis dan emosional yang belum stabil mempengaruhi sikap dalam membentuk ketahanan keluarga, kelahiran di usia muda yang berisiko

terhadap kematian ibu dan bayi, serta jarak kehamilan yang terlalu berdekatan, hingga munculnya kemiskinan baru karena keterbatasan mengembangkan diri melalui Pendidikan.

5. Data dan Informasi Kependudukan

Isu strategis pada pilar ini ada beberapa yang perlu diperhatikan yakni:

- a. Belum terintegrasinya informasi kependudukan dari berbagai sumber data
- b. Belum optimalnya manfaat akses pelayanan administrasi kependudukan oleh masyarakat,
- c. Pemanfaatan data dan informasi secara digitalisasi yang belum dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berisi pernyataan yang menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dipertegas oleh arah kebijakan. Kebijakan dalam pembangunan kependudukan sebagai sentral pembangunan agar dapat tercapai pembangunan yang berwawasan kependudukan dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan harus mengakomodasi semua kepentingan, baik dari pusat, provinsi, daerah serta masyarakat. Sejak tahap perumusan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi kebijakan kependudukan harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan. Berikut arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan Kabupaten Karawang pada tahun 2025-2045.

A. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kondisi kuantitas penduduk yang ini dicapai ialah stabilnya jumlah pertumbuhan penduduk, dengan kondisi tersebut diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga tercapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS). Kebijakan pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera dalam program Keluarga Berencana (KB). Secara umum arah kebijakan program Keluarga Berencana meliputi (a). pendewasaan usia perkawinan; (b). pengaturan kehamilan yang diinginkan; (c). pembinaan kesetaraan keluarga berencana; (d). penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan; peningkatan akses pelayanan keluarga berencana.

Kebijakan terhadap strategi pengendalian kuantitas penduduk terhadap kebijakan penurunan mortalitas antara lain (a) memprioritaskan ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas; (b). kematian bayi, balita, ibu terutama disebabkan faktor-faktor yang dapat dicegah; (c). perluasan edukasi dan partisipasi keluarga menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah terjadi kesakitan dan kematian.

Terpenuhinya upaya pengendalian fertilitas dan terjaganya mortalitas, sehingga dapat berlanjut pada kondisi penduduk tanpa pertumbuhan pada tahun 2045, upaya tersebut dapat meliputi:

1. Mengupayakan agar usia kawin pertama (UKP) tidak menurun, antara lain melalui peningkatan partisipasi sekolah dan peningkatan peluang kerja bagi perempuan. Dengan semakin tinggi pendidikan perempuan semakin membuka kesempatan perempuan untuk berpartisipasi di pasar kerja. Kemandirian perempuan dapat mencegah terjadinya pernikahan dini;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan KB;
3. Mengatur jumlah dan jarak kehamilan yang diinginkan;
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi;
5. Memberikan pemahaman tentang norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera sejak masih remaja serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan reproduksi remaja serta mendorong PIK Remaja dan Generasi Remaja Berencana;
6. Mengupayakan agar akseptor KB jangka pendek (pil dan suntik) beralih menjadi akseptor KB MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) yaitu IUD, implant, dan MoW, MoP.

B. Peningkatan Kualitas Penduduk

1. Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan

Demi meningkatkan usia harapan hidup dan peningkatan terhadap kualitas penduduk di Kabupaten Karawang secara berkelanjutan, untuk menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin lebih baik. Selain itu usia harapan hidup, indikator di bidang kesehatan terhadap kualitas penduduk juga ditentukan oleh angka kematian Ibu dan bayi. Strategi terhadap peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan antara lain:

- a. Memperkuat layanan pre dan antenatal pada kesehatan ibu hamil, melahirkan dan nifas agar meminimalisir kematian;
- b. Mengidentifikasi penyebab stunting lebih cermat agar penanganan lebih cepat;
- c. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai dari bayi usia 6–24 bulan dan makanan bagi ibu hamil KEK;
- d. Mengembangkan dan menyediakan materi untuk sarana promosi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait kesehatan ibu;
- e. Penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader);
- f. Perbaikan kualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan bagi bayi dan balita;
- g. Mempromosikan kesehatan sebagai upaya preventif;
- h. Mengedukasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular terhadap usai remaja;

-
- i. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular lainnya.

Strategi peningkatan kualitas penduduk dalam perbaikan status gizi masyarakat, dengan:

- a. Meningkatkan surveilans pangan dan gizi;
 - b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang;
 - c. Kegiatan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi
 - d. Fortifikasi;
 - e. Penanggulangan gizi darurat;
2. Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan

Upaya strategi kebijakan yang dilakukan dengan memberikan akses terhadap kelompok rentan dan khusus penduduk di bawah rata-rata ekonominya untuk mendapat akses pendidikan yang sesuai standar. Strategi perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui:

- a. Peningkatan pemerataan SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (*short course, exchange, and adoptive teaching*);
- b. Meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kependidikan
- c. Meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang mengarah ke PISA melalui *workshop Micro Learning*
- d. Memberikan akses dan daya tampung peserta didik formal dan non formal (Wajar Dikdas 9-12 tahun);

- e. Pengembangan kurikulum berbasis karakter (*skill, knowledge, technology, and attitude*);
- f. Mengsosialisasikan metode pembelajaran berbasis HOTS (*higher order thinking skill*) literasi
- g. Pemberdayaan dan penguatan pemuda wirausaha dan kejuruan (*skill*)
- h. Penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional;
- i. Meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan Pendidikan;
- j. Mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan;
- k. Mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas Pendidikan;
- l. Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan Pendidikan;
- m. Peningkatan literasi masyarakat terutama anak usia sekolah;
- n. Pengembangan nilai-nilai budaya terutama pada anak usia sekolah.

3. Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi

Pemerintah memiliki peran yang sentral dalam mengelola dan mengatur percepatan pertumbuhan kualitas di bidang ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi, antara lain:

- a. Memperluas keterampilan dan kewirausaha di Pendidikan formal dengan forum UMKM;

- b. Memprioritaskan pemberdayaan dan pengamanan ekonomi pada kelompok rentan miskin;
- c. Peningkatan akses kebutuhan pasar kerja di dunia industri;
- d. Perbaikan infrastruktur untuk mendukung perbaikan ekonomi perdesaan;
- e. Penguatan ekonomi regional melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan di wilayah strategis;
- f. Menyediakan sarana informasi dan fasilitas pemasaran dalam rangka pengembangan produk-produk unggulan daerah;
- g. Penguatan pelayanan iklim investasi yang kondusif melalui pada birokrasi dan jaminan berinvestasi;
- h. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan pola pendampingan dalam aspek pemasaran, manajemen, permodalan, dan aspek lainnya dalam rangka memperkuat usaha berbasis ekonomi kerakyatan;

Selain dalam hal pembangunan ekonomi, strategi ekonomi juga dipersiapkan untuk tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui:

- a. Mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi);
- b. Sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi;
- c. Meningkatkan akses lapangan kerja dengan pengembangan industri berbasis pada teknologi;

- d. Mendorong pengembangan wirausaha, termasuk wirausaha muda;
- e. Mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru
- f. Mengembangkan budaya inovatif;
- g. Mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.

C. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain disebut sebagai mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk disuatu wilayah terjadi karena adanya faktor yang mendorong dan menarik dalam suatu wilayah seperti kondisi sosial ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang menyebabkan orang tersebut ingin pergi ke daerah lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. Untuk mencapai kondisi tersebut maka strategi yang harus dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan promosi mobilisasi wilayah tujuan baru sesuai dengan potensi wilayah;
- b. Aturan pedoman pelayanan penduduk musiman/nomaden;
- c. Mengembangkan potensi ekonomi desa dengan antar desa;
- d. Penataan mobilisasi pusat ekonomi daerah sebagai *urban fring*;
- e. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung wilayah;
- f. Mempromosikan pengarahannya persebaran penduduk untuk mencapai konektivitas wilayah dalam rangka pengembangan potensi nilai ekonomi lokal yang terdapat pada setiap kecamatan;

- g. Peningkatan infrastruktur yang mampu mendorong tumbuhnya investasi dan pergerakan penduduk sesuai dengan tata ruang wilayah;
- h. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kecamatan-kecamatan yang relatif tidak padat penduduk;
- i. Penyiapan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman, untuk meningkatkan daya saing wilayah baru dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat;
- j. Penyediaan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa wilayah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk.

D. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi yang ideal secara kualitas. Pembangunan keluarga juga dilakukan agar terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Strategi pembangunan keluarga dapat dilakukan yakni:

- a. Membangun keluarga melalui pendidikan etika, moral, agama, dan sosial budaya secara formal maupun informal agar berkarakter baik;
- b. Membangun keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, melalui penyadaran masyarakat untuk melangsungkan perkawinan minimal usia 19 tahun;
- c. Mengedukasi pentingnya pendewasaan usia perkawinan pertama melalui Badan Penasihat Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4);

-
- d. Memperkuat kemitraan dan kerja sama dengan tokoh agama di tingkat lingkungan dengan Pemerintah Daerah;
 - e. Meningkatkan perilaku hidup sehat dalam keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan);
 - f. Mengembangkan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga dengan pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial lingkungan;

E. Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan

Kebijakan guna menyesuaikan penggunaan teknologi dibidang pengembangandata dan informasi kependudukan dirasa penting mengingat database saat ini dituntut untuk dapat dilakukan secara digitalisasi. Strategi administrasi dan manajemen data dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan dan optimalisasi basis data kependudukan secara digital (secure, protection, and reliable);
- b. Basis Data kependudukan sebagai acuan perencanaan pembangunan berkelanjutan disetiap sektor;
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat kesadaran administrasi kependudukan
- d. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah dan pelayanan publik secara professional;
- e. Mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan tinggi;
- f. Mengembangkan sistem data kependudukan dan keluarga terpadu berbasis teknologi informasi.

BAB VI

ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Penyusunan roadmap pembangunan kependudukan dilakukan secara periodik tertentu untuk operasionalisasi terhadap strategi pembangunan yang dilakukan untuk ketercapaian yang disesuaikan dengan Indonesia Emas 2045 pada RPJPMN. Ketercapaian tersebut berupa langkah-langkah kegiatan yang sistematis dan terencana. Roadmap ini juga mempertimbangkan kondisi antara lain tantangan, peluang masa depan, kekuatan dan kelemahan yang ada, faktor strategis yang muncul, dan program sebagai amanat pembangunan.

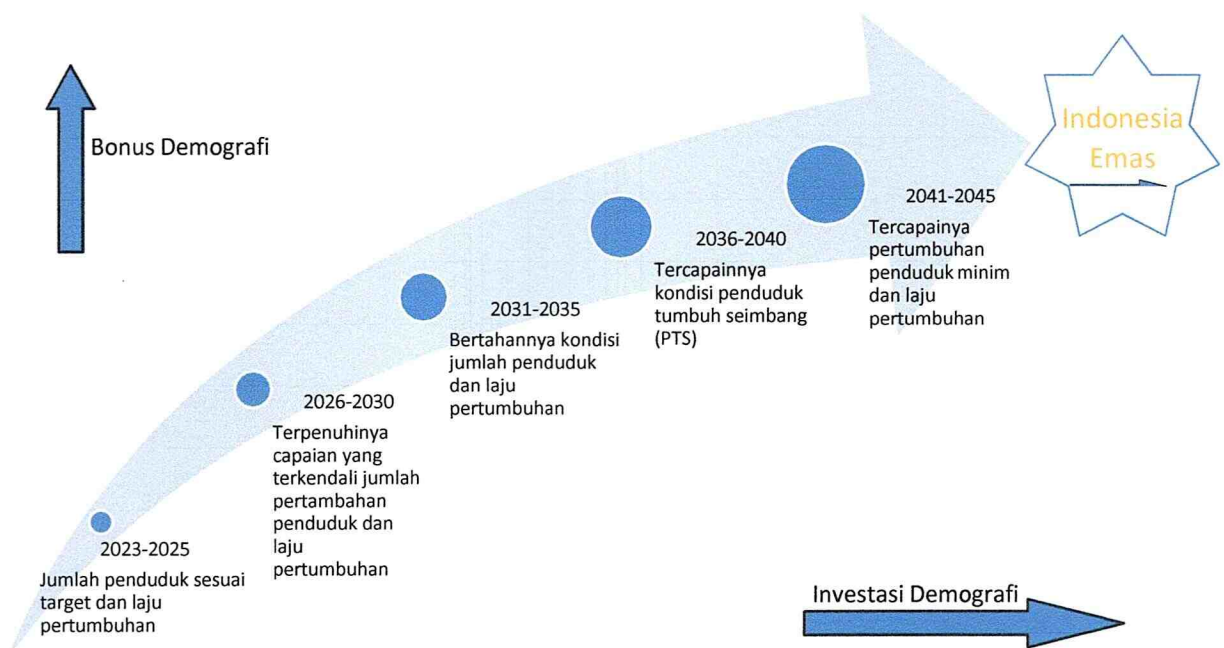


Gambar 6.1 Tahapan Tujuan Transformasi

Roadmap pembangunan kependudukan Indonesia dibuat bertahap 5 tahunan yang dimulai sejak tahun 2025-2045. Hal ini untuk menunjukkan strategi dan perencanaan dalam menguraikan 5 pilar yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, persebaran dan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, dan data dan informasi kependudukan.

A. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

Harapan jangka panjang terhadap kuantitas kependudukan yang diinginkan adalah tercapai penduduk dengan kenaikan yang stabil dan seimbang. Kondisi ini diharapkan jumlah bayi yang lahir (TFR) sama atau seimbang dengan jumlah angka kematian (mortalitas) yang terjadi, sehingga berdampak pada penduduk tumbuh seimbang (PTS). Upaya mengendalikan kuantitas yang diinginkan juga dilakukan dengan Menyusun beberapa indikator pencapaian sasaran pengendalian secara bertahap yang dilakukan dengan indikator pencapaian 5 tahunan.



Gambar 6.2 Tahapan Strategis Pengendalian Kuantitas Penduduk

Peta jalan pengendalian kuantitas penduduk Kabupaten Karawang selama kurun waktu 2024- 2045 juga diarahkan untuk mempertahankan dan mengotimalkan pencapaian bonus demografi. Bonus demografi dengan beberapa indikator yang digunakan untuk memberikan gambaran serta perhitungan secara

proyeksi untuk capaian pada setiap periode 5 tahun yang diperhitungkan yang terdapat pada tabel 6.1 sebagai berikut:.

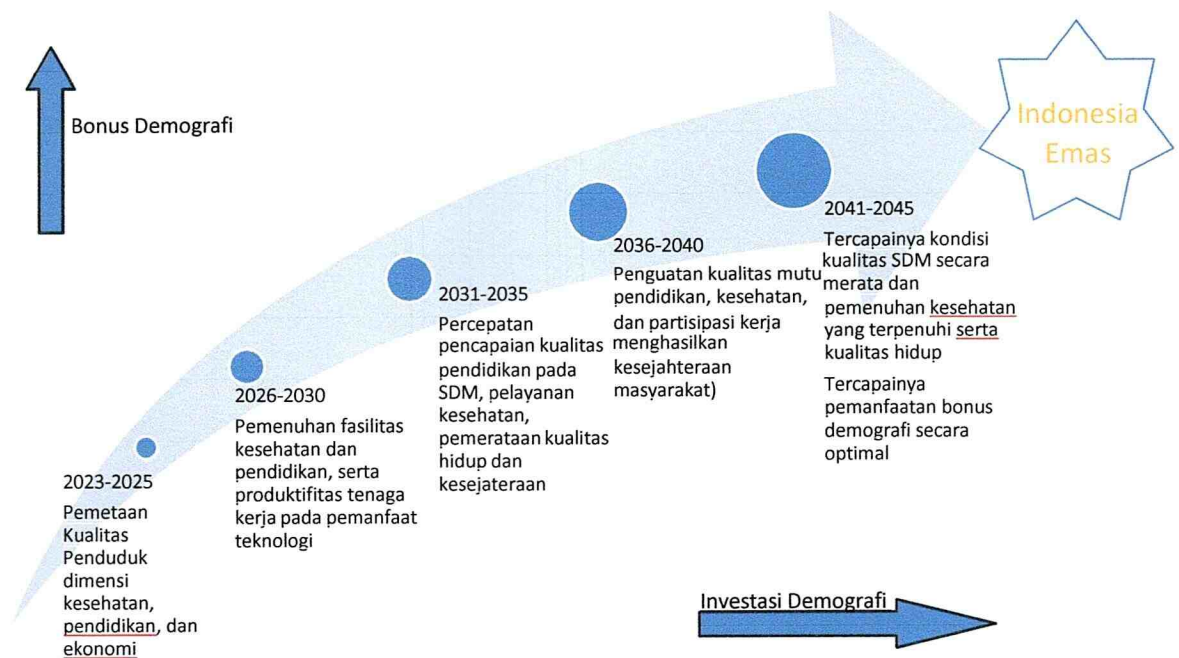
Tabel 6.1 Roadmap Indikator Pengendalian Kuantitas Penduduk

Indikator	Tahun Dasar (2022)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	2,505,247	2,581,250	2,703,130	2,805,590	2,885,993	2,942,204
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1.49	0.67	0.93	0.75	0.57	0.39
Total Fertility Rate (TFR) (%)	2.22	2.21	2.18	2.16	2.14	2.12
Age Spesific Fertility Rate (ASFR) (jiwa)	444.0	441.2	436.7	432.2	427.7	423.2
Cakupan Peserta KB	323	329	338	347	356	365
Angka Kematian Bayi (IMR)	178	160	150	140	130	120
Angka Kematian Ibu (MMR)	52	55	50	45	40	35

Sumber: Diproyeksikan 2023

B. Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk

Roadmap pada pilar peningkatan kualitas akan dilihat dari tiga bidang, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, pembahasan peta jalan pilar kedua ini akan dibagi menjadi tiga sesuai dengan ketiga bidang tersebut. gambaran untuk capaian pada tahun-tahun berikutnya (grafik 6.3) sebagai berikut:



Gambar 6.3 Strategis Peningkatan Kualitas Penduduk

Uraian roadmap setiap bidang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualitas Penduduk di Bidang Kesehatan

Roadmap pembangunan kependudukan bidang kesehatan tampak pada Tabel

6.2. Terdapat beberapa indikator bidang kesehatan, yaitu jumlah kematian ibu, jumlah kematian bayi, jumlah kematian balita, usia, prevalensi balita gizi buruk, dan prevalensi stunting. Berdasarkan hasil proyeksi, yang telah dilakukan berdasarkan tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 6.2 Roadmap Indikator Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan

Indikator	Tahun Dasar (2022)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Angka Harapan Hidup	72.62	73.60	75.28	76.98	78.73	80.52
Angka Kematian Bayi	178	160	150	140	130	120
Angka Kematian Balita	4	5	4	3	2	2
Angka Kematian Ibu	52	55	50	45	40	35
Prevalensi Balita Gizi Buruk	2.42	1.86	1.30	1.00	1.00	1.00
Prevalensi <i>Stunting</i>	14	13.5	10.5	8.5	6.5	5

Sumber: Diproyeksikan 2023

2. Kualitas Penduduk di Bidang Pendidikan

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas penduduk di Bidang Pendidikan di Kabupaten Karawang secara garis besar bertujuan untuk investasi demografi menuju bonus demografi 2045. Berdasarkan proyeksi (tabel 6.3) untuk ketercapaian tahun 2045 dengan roadmap sebagai berikut:

Tabel 6.3 Roadmap Indikator Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan

Indikator	Tahun Dasar (2022)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Rata-rata Lama Sekolah	8.04	8.47	9.22	9.98	10.738	12
Harapan Lama Sekolah	12.19	12.4	12.7	13.1	13.5	14.81
Angka Partisipasi Kasar SD/MI	103.6	100.1	100.0	100.0	100.0	100.0
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	89.5	91.2	94.4	97.7	100	100
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	80.0	83.9	87.5	91.2	94.8	98.5

Sumber: Diproyeksikan 2023

3. Kualitas Penduduk di Bidang Ekonomi

Peningkatan terhadap kualitas penduduk di bidang ekonomi pada tahun 2045 ialah tercapainya penduduk dengan pendapatan tinggi, tingkat kemiskinan yang rendah, dan ketersediaan lapangan kerja yang luas serta partisipasi angkatan kerja yang tinggi. Penyusunan proyeksi (tabel 6.3) mengarah pada roadmap yang bertujuan pada capaian tahun 2045 sebagai berikut:

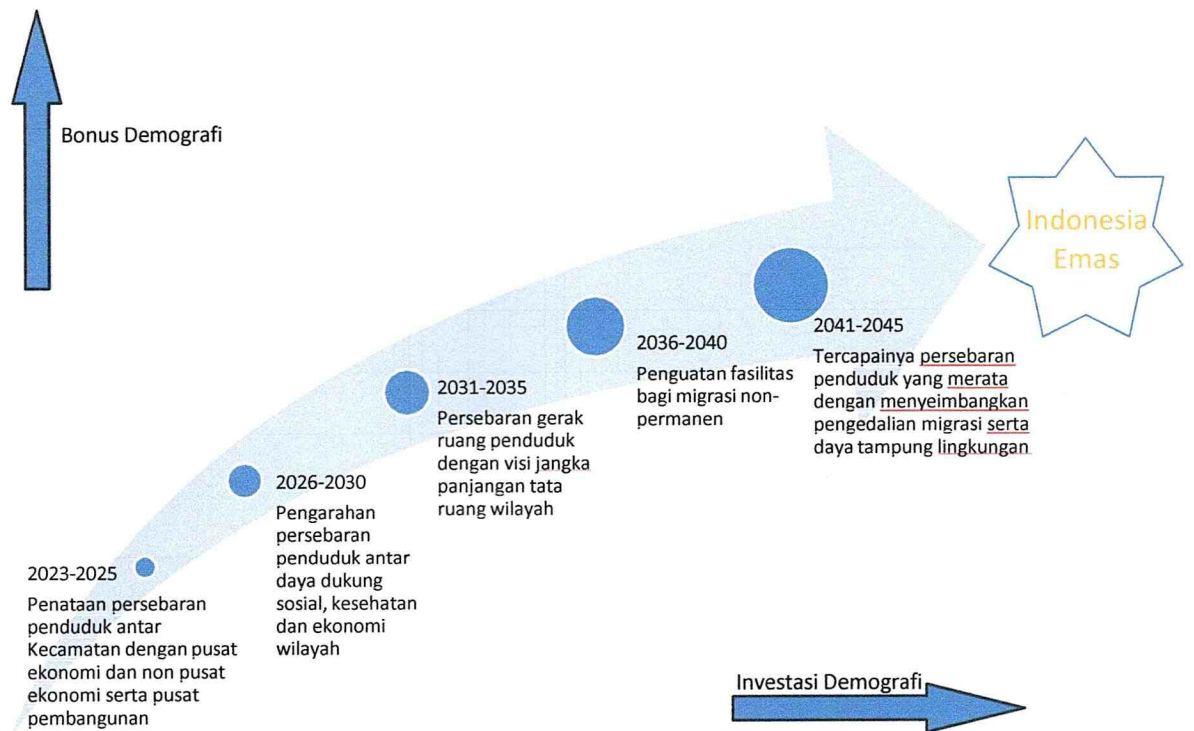
**Tabel 6.4 Roadmap Indikator Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang
Ekonomi**

Indikator	Tahun Dasar (2022)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
PRDB Per-Kapita (juta)	70.84	70.55	73.04	75.53	78.02	80.51
Rasio Ketergantungan	40.95	41.95	44.76	46.46	47.79	48.72
Tingkat Pengeluaran Per-Kapita	11,927	12,102	12,635	13,168	13,701	14,234
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9.87	5.60	3.80	3.80	3.80	3.80
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64.77	66.75	69.9	75.55	74.63	76.08
Jumlah Penduduk Miskin	199.91	156.21	99.31	62.57	39.07	24.18
Persentase Penduduk Miskin	8.44	6.05	3.67	2.23	1.35	0.82

Sumber: Diproyeksikan 2023

C. Roadmap Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Roadmap persebaran dan mobilitas penduduk pada pilar ini dengan bertujuan dengan kondisi yang diinginkan adalah “Tercapainya Persebaran Penduduk yang Merata, Optimal dan Proporsional sesuai Ketersediaan Alam dan Daya Tampung Lingkungan”. Roadmap pada pilar ini sebagai berikut:



Gambar 6.4 Tahapan Strategis Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa arah tujuan yang diharapkan pada persebaran dan mobilitas penduduk meliputi beberapa kebijakan sesuai dengan roadmap di atas, sehingga capaian proyeksi (tabel 6.4) dapat terwujud persebaran dan mobilitas yang merata, yakni sebagai berikut:

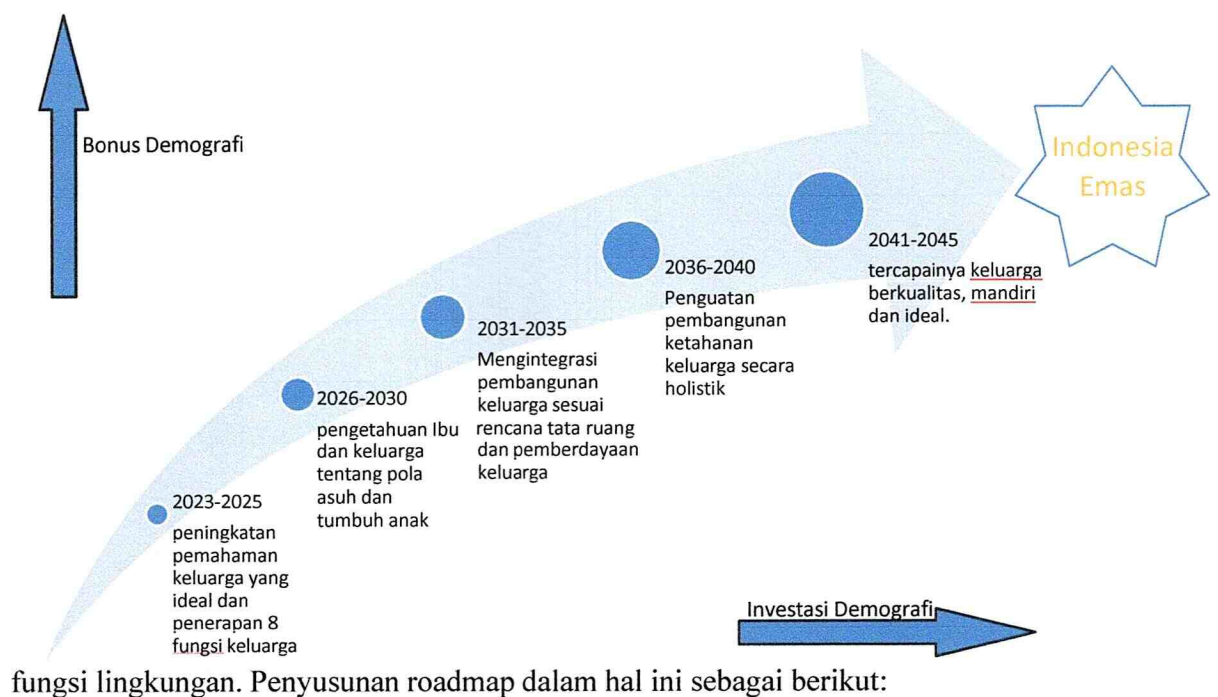
Tabel 6.5 Roadmap Indikator Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Indikator	Tahun Dasar (2022)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Migrasi Masuk	17,312	17,781	21,543	25,306	29,068	32,830

Sumber: Diproyeksikan 2023

D. Roadmap Pembangunan Keluarga

Tujuan pembangunan keluarga yang berkualitas merupakan capaian terhadap keluarga yang ideal. Dalam hal ini penerapan terhadap 8 fungsi keluarga yaitu fungsi Agama, fungsi cinta kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi social dan budaya, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan



fungsi lingkungan. Penyusunan roadmap dalam hal ini sebagai berikut:

Gambar 6.5 Tahapan Strategis Pembangunan Keluarga

Roadmap pembangunan keluarga diarahkan untuk meningkatkan pembangunan keluarga demi terwujudnya keluarga ideal, yang juga berdampak dari kuantitas dan kualitas, tujuan capaian tersebut agar fungsi keluarga dapat aktualisasikan di masyarakat sehingga tercapaian (tabel 6.5) pada tahun 2045 menjadi Indonesia Emas terwujud, yakni sebagai berikut:

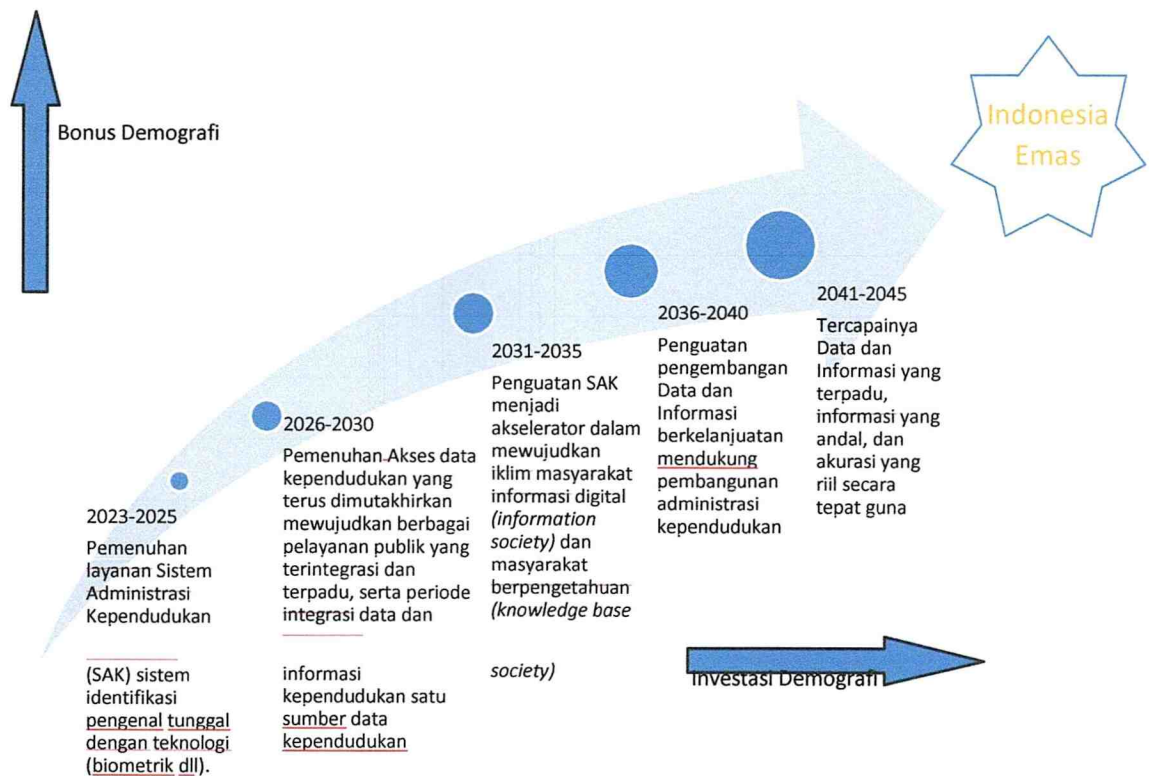
Tabel 6.6 Roadmap Indikator Pembangunan Keluarga

Indikator	Tahun Dasar (2022)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	111,217	110,249	109,280	108,311	107,342	106,374
Kasus Perceraian	4,286	4,902	5,902	6,903	7,903	8,904

Sumber: Diproyeksikan 2023

E. Roadmap Data dan Infomasi Kependudukan

Roadmap terhadap pembangunan manajemen data dan informasi kependudukan



dalam menyikapi perkembangan teknologi sebagai berikut:

Gambar 6.6 Tahapan Strategis Data dan Informasi Kependudukan

Data dan informasi kependudukan merupakan pondasi yang mendukung keempat pilar pembangunan kependudukan lainnya. Data dan informasi kependudukan Kabupaten Karawang ke depan diarahkan agar tersedia sistem informasi data kependudukan tunggal yang terpercaya dan termutakhirkan untuk mendukung kebijakan lintas sektor, sebagaimana pada tabel 6.6 berikut:

Tabel 6.7 Roadmap Indikator Data dan Informasi Penduduk

Indikator	Tahun	Target				
	Dasar (2022)	2025	2030	2035	2040	2045
Persentase Anak (Usia 0-17 tahun) memiliki Akte Kelahiran	97.54	105.68	118.75	131.82	144.89	157.96
Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	23.0%	25.1%	30.0%	40.0%	50.0%	75.0%
Persentase Kepemilikan AKta Perkawinan	53.16	48.6	66.58	84.56	90.2	91.1
Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	90	93	94	95	96	97

Sumber: Diproyeksikan 2023

BAB VII

PENUTUP

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Karawang 2025-2045 terdiri dari lima pilar, yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas kependudukan, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, serta data dan informasi kependudukan. Pengelolaan dan pengembangan kebijakan kependudukan bertujuan mendukung pembangunan sebagai komitmen yang berkelanjutan untuk Kabupaten Karawang. GDPK Kabupaten Karawang merupakan kunci utama dalam pengembangan kependudukan, terutama mempersiapkan bonus demografi melalui pengelolaan mencapai tahun 2045.

Kebijakan strategis kependudukan yang baik merupakan konektivitas dari tantangan pembangunan terutama pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Karawang berdasarkan lima pilar tersebut. GDPK merupakan salah satu dokumen resmi yang dapat menjadi rujukan guna penyusunan kebijakan ke depan secara strategis dan program pembangunan yang berkelanjutan pada berbagai sektor. Sebab pembangunan sebagai dasar seutuhnya untuk melakukan kehidupan yang berkelanjutan.

The official seal of Kabupaten Karawang, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'BUPATI KARAWANG' and 'KARAWANG'.
BUPATI KARAWANG,
AEP SYAEPULOH

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, Karawang dalam Angka 2018, BPS Kabupaten Karawang: 2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, Karawang dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Karawang: 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, Karawang dalam Angka 2020, BPS Kabupaten Karawang: 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, Karawang dalam Angka 2021, BPS Kabupaten Karawang: 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, Karawang dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Karawang: 2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020*, BPS Provinsi Jawa Barat: 2023.
- Kementerian PPN/Bappenas, *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*, Bappenas: 2019.
- Kementerian PPN/Bappenas, *Kependudukan Berkualitas Menuju Indonesia Emas: Kebijakan Kependudukan Indonesia 2020-2050*, Bappenas: 2023.
- Suparman dkk, *Pembangunan Kependudukan Teori, Konsep, dan Studi Empiris*, Jakarta, Publica Indonesia Utama: 2022.
- Jurnal**
Silvia Rope H. dan Nadiroh, “Masalah Gizi Buruk Mengakibatkan Stunting di Indonesia”, Jurnal Human Nutrition, Juni 2019
- Internet**
<https://rejogja.republika.co.id/berita/rz4nur291/menurunkan-angka-kematian-ibu>, diakses 11 November 2023
<https://dataindonesia.id/varia/detail/umur-harapan-hidup-di-indonesia-sebesar-7185-tahun-pada-2022>.